

## **BAB III**

### **SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. SAJIAN DATA**

Strategi komunikasi merupakan sebuah pengolahan suatu hal yang melibatkan komunikator, komunikan, isi atau pesan, cara dan efek yang ditimbulkan. Strategi komunikasi sendiri bekerja sebagai suatu perencanaan dan manajemen yang terstruktur dengan sistem konkret dalam bentuk taktik. Dalam menyampaikan suatu informasi, taktik akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program guna melancarkan tujuan dan sasaran, terlebih hubungan mereka yang saling memiliki ketergantungan. Semakin rumitnya tujuan dan sasaran maka taktik yang akan dijalankan juga harus lebih kreatif dan variatif.

Melihat beberapa pertimbangan tersebut, BPPM DIY memilih taktik kreatif yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Saptosari yaitu kegiatan berbentuk deklarasi untuk diadopsi kepada seluruh kecamatan yang ada di DIY. Melalui kegiatan deklarasi ini, mekanisme penyampaian informasi program PUP dianggap baik dan dapat bernilai efektif karena hal tersebut berdasarkan dengan tujuan dari BPPM tersendiri, yaitu supaya lebih mudah dalam mengajak masyarakat DIY untuk melaksanakan program PUP.

Menurut BPPM DIY, deklarasi adalah suatu komitmen dalam bentuk tertulis atau tulisan yang diucapkan dan dibaca secara bersama-sama yang

mana tulisan tersebut ditirukan, diresapi dan dipahami sebagai parameter didalam diri individu masing-masing. Melalui deklarasi ini strategi yang dilakukan oleh BPPM DIY dikelola secara matang melalui fungsi perencanaan dan manajemen yang dikelola sebagai berikut:

**a. Perencanaan Komunikasi (*Planning*)**

Ada beberapa langkah perencanaan yang BPPM lakukan dengan segala pertimbangan dan melihat kondisi khalayak ataupun berbagai data berdasarkan sumber dilapangan guna memenuhi prediksi-prediksi dikemudian harinya. Pada tahapan perencanaan ini juga BPPM memilih bagaimana cara yang tepat untuk menyebarluaskan pesan kepada khalayak. Maka langkah-langkah yang dilakukan BPPM pada tahap perencanaan ini, adalah:

1. Analisis isu dan peranan komunikasi.

Langkah awal pada suatu proses perencanaan adalah analisis masalah atau isu dan peranan komunikasi yang berada di dalamnya secara terstruktur. Awal mula terbentuknya program PUP yang merupakan sebuah program untuk mengajak masyarakat mendewasakan usia perkawinan anak adalah melalui survey data dan sejauh mana masalah itu telah berkembang.

Program PUP ini awal mulanya terbentuk karena data, sebelumnya kami bertanya-tanya dulu sebenarnya masalah yang masih sering ditemui di kabupaten sendiri apa sih dan ternyata muncullah permasalahan pernikahan dini. Jadi mulai dari 2015 kami sudah ada koordinasi lintas kabupaten ataupun

SKPD, lalu kami juga mendapatkan data-data pendukung tentang besarnya dispensasi pernikahan yang diberikan sehingga seharusnya ada gerakan bukan hanya disetujui saja. Lalu diteliti lagi ternyata masih banyak anggapan orang tua kalau sudah punya anak yang baligh ya dinikahkan saja biar beban ekonomi berkurang dan biar gak keblabasan nantinya. Dan akhirnya kami buat TOR permasalahan itu dan kami kumpulkan kepada bidang perencanaan agar menjadi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Maka dari itu, PUP mulai dibentuk latar belakang masalahnya dan kami sampaikan sampai terdengar di telinga sultan. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Tahapan analisis isu dan peranan komunikasi didalamnya ini dilakukan oleh BPPM yang pertama dengan adanya data di lapangan. Berdasarkan survey ditemukan banyak-nya dispensasi pernikahan yang ada di DIY sendiri seperti berikut :

**Tabel 3.1**

**Data Dispensasi Perkawinan di DIY**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>PA Wates</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>PA Bantul</b>	<b>142</b>	<b>137</b>	<b>178</b>	<b>131</b>
<b>PA Wonosari</b>	<b>132</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>141</b>
<b>PA Sleman</b>	<b>107</b>	<b>117</b>	<b>126</b>	<b>115</b>
<b>PA Yogyakarta</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
<b>DI YOGYAKARTA</b>	<b>495</b>	<b>515</b>	<b>563</b>	<b>482</b>

Sumber: Pengadilan Agama DIY tahun 2015

**Tabel 3.2**  
**Data Dispensasi Perkawinan Bulan Januari-April 2016**

NO	WILAYAH	JUMLAH
1	PA SLEMAN	28
2	PA WATES	23
3	PA WONOSARI	23
4	PA YOGYAKARTA	16
5	PA BANTUL	belum ada laporan

Sumber: Pengadilan Agama tahun 2016

Dalam kesehariannya dispensasi perkawinan diartikan sebagai permohonan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah. Pihak yang mengajukan permohonan adalah orang tua (ayah atau ibu) dari anak yang hendak di nikahkan (<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-pengaduan/blanko-surat/209-dk> diakses pada 18 Maret 2018).

Berdasarkan beberapa sumber data melalui survey lapangan dan banyaknya pemahaman mengenai pernikahan dini yang belum terselesaikan itulah akhirnya program PUP terbentuk sebagai penegasan bahwa harusnya seluruh komponen masyarakat terlibat dalam menurunkan jumlah pernikahan dini. Setelah adanya *sharing-sharing* bersama beberapa kabupaten, muncul peluang yang dapat

menjadi kekuatan bagi BPPM dalam menjalankan program PUP, hal ini terlintas melalui deklarasi.

Untungnya lagi setelah kami berkoordinasi dan sharing-sharing mengenai permasalahan pernikahan dini dan berinisiatif mau mengadakan program PUP, kami belum tau sistem yang akan dijalankan untuk program ini seperti apa. Sampai akhirnya perwakilan Gunung Kidul ada yang mengajukan tangan dan cerita bagaimana kalau mengikuti cara Saptosari yaitu melalui deklarasi. Deklarasi ini akhirnya bisa menurunkan jumlah pernikahan dini jadi 0 padahal Saptosari kecamatan paling tinggi se-Jogja. Akhirnya cara ini kami adopsi sehingga bentuk kegiatan program PUP kami mengarah pada sistem deklarasi (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Jadi dalam menganalisis isu dan peranan komunikasi BPPM sudah melihat kondisi masyarakat secara *real* berdasarkan sumber data ataupun fakta dilapangan serta melihat peranan komunikasi yang harus lebih ditingkatkan lagi baik adanya perhatian khusus maupun melalui komitmen yang akan mereka laksanakan sesuai dengan isi dari lembar komitmen mereka masing-masing.

## 2. Menyeleksi kelompok sasaran/ audiens dan *stakeholders*

Dalam hal ini BPPM DIY sudah membuat langkah-langkah terstruktur dan menyeluruh guna menjalankan program PUP sesuai dengan rencana. BPPM sendiri menyeleksi kelompok sasaran menjadi tiga bagian, yang mana tiga bagian tersebut merupakan komponen

mendasar dalam menjalankan program PUP, berikut sasaran dari BPPM DIY kepada masing-masing kecamatan:

- a. Sasaran Primer: remaja usia 10 - 24 tahun diranah sekolah maupun masyarakat pada 78 Kecamatan se DIY, yang mana terdiri dari unsur remaja di masyarakat seperti pelajar atau anak sekolah, kelompok remaja masyarakat, organisasi keagamaan remaja, remaja difabel, kelompok remaja jalanan dan pendamping.
- b. Sasaran Sekunder: sasaran selanjutnya yaitu kepada para instansi/lembaga yang terkait dengan kepentingan program Kesehatan Reproduksi Remaja baik itu di tingkat kecamatan ataupun kelurahan (desa).
- c. Sasaran tersier: sasaran selanjutnya kepada pimpinan-pimpinan pembuat kebijakan. Saat ini beberapa pemimpin daerah atau bupati sebagai *stakeholder* BPPM mengeluarkan peraturan sendiri dalam mempertegas program PUP. Contohnya saja di Kulon Progo sendiri, terdapat peraturan bupati No 9 Tahun 2016 mengenai pencegahan perkawinan. Dalam peraturan tersebut perkawinan anak hanya diperbolehkan Pengadilan Agama Kulon Progo jika telah mendapatkan rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinsos P3A. Sehingga, BPPM lebih mudah untuk memantau

program PUP dengan dukungan dari masing-masing lembaga pembuat kebijakan atau yang memegang wewenang secara penuh.

Sasaran-sasaran yang sudah dijelaskan diperkuat dengan argumen kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes sebagai berikut:

Deklarasi ini memang menasar dari elemen dasar masyarakat yaitu remaja, seperti pelajar, lalu organisasi remaja desa, lembaga masyarakat, instansi yang akan membuat kebijakan, maupun seluruh lembaga yang berkaitan untuk menuntaskan pernikahan dini. Deklarasi ini harus dipahami oleh mereka. Jadi nantinya mereka sudah tau batasan kalau misalnya pergi berdua-duaan kira-kira akan ditegur sama polisi atau masyarakat setempat atau nanti ya masyarakat yang belum mengerti dampak yang ditimbulkan kepada anak akan seperti apa itu nanti dikasih tau waktu deklarasi. Selain itu juga kan akhirnya seluruh elemen masyarakat tersebut harusnya bukan hanya sekedar mengucapkan tapi berkomitmen dan meresapi dari isi komitmen tersebut (hasil wawancara pada 16 Maret 2018).

Dari penyampaian dan data yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditentukan oleh BPPM DIY dalam menginformasikan program PUP sudah sangat sesuai. Karena terbagi dan tersusun rapi sesuai sebuah perencanaan yang baik.

### 3. Menentukan target komunikasi

Terdapat beberapa target yang dibuat BPPM DIY guna melancarkan program PUP di 78 kecamatan ini. Sesuai dengan

maksud diadakannya PUP berikut maksud ataupun target program tersebut:

- a. Berkurangnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun.
- b. Turunnya angka pernikahan dini atau remaja di DIY pada umumnya.

Seperti yang kita ketahui BPPM DIY memang mengembangkan maksud ataupun target sesuai dengan perkembangan berbagai sajian data mulai dari aspek kesehatan reproduksi, aspek kematangan psikologis, aspek ekonomi, pendidikan maupun kependudukan. Hal ini dikemas menjadi satu bagian dan menjadi target secara umum bagi BPPM DIY.

Target kami yang utama memang berkurangnya pernikahan dini atau remaja di DIY selain itu ya sudah pasti adanya kematangan psikologis dari pasangan usia subur ataupun istri secara lebih khusus. Karena program PUP memang secara tidak langsung sebenarnya memaksa mereka untuk berkomitmen, jadi upaya kami ya mereka faham terus melaksanakan (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

#### 4. Mengembangkan strategi dan seleksi mitra

Strategi yang disusun oleh BPPM dikembangkan dan tak lupa untuk melihat celah ataupun peluang yang terbaik bagi instansi tersebut. BPPM mengajak seluruh lembaga yang berada dekat dan

kaitannya sangat intens dengan seluruh masyarakat. Seperti berdasarkan hasil wawancara berikut:

BPPM DIY sendiri mengkonsepkan program PUP dengan memilih LSM Kunala, dinas lintas SKPD, ataupun pemberdayaan KB setempat. LSM Kunala ini adalah LSM yang bergerak pada bidang advokasi kesehatan remaja yang mana kuat kaitannya dengan aspek kesehatan reproduksi pada masa usia subur. Jadi pada saat deklarasi program PUP, LSM ini akan membuka kesempatan untuk remaja yang ingin berkonsultasi. Selain itu pada saat deklarasi nanti, kami akan memberikan penyuluhan jadi strategi-nya tuh dikasih dulu pemahaman, yang ngisi saya, pak camat masing-masing dan bagian kesehatan reproduksi remaja di puskesmas setempat. Jadi keluarannya bukan hanya komitmen saja tapi pemahaman ada, masing-masing tamu undangan mengerti dan berpartisipasi dalam upaya memberi penjelasan lagi ke masyarakat lain yang belum tau mengenai bagaimana pentingnya aspek kematangan seorang remaja yang masih membutuhkan pendidikan, kesehatan reproduksi yang seimbang, serta kebutuhan psikologis yang terstruktur (Hasil Wawancara dengan dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Selain penjelasan BPPM DIY sendiri untuk wilayah khusus yaitu kabupaten Kulon Progo, Pemkab membuat beberapa kegiatan menarik dan pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) sebagai bahan pertimbangan program PUP kedepannya. Melalui tiga faktor tersebut, harapannya Kulon Progo dapat menjadi panutan bagi kabupaten lainnya secara umum dan kecamatan yang ada di DIY secara khusus. Berikut hasil wawancara bersama Drs Mardiyah dalam memperkuat strategi dan taktik yang dilakukan BPPM dan Pemkab Kulon Progo sendiri:

Masyarakat Kulon Progo ini memang tidak terlalu tinggi kalau kasus pernikahan dini yang penyebabnya kayak orang tua yang memang pingin nikahin anaknya karena udah baligh, itu biasanya sih memang yang pinggiran banget. Tapi rata-rata ya mungkin penyebabnya kalo gak hamil diluar nikah (KTD) ya pergaulan. Sekarang itu pergaulan bebas udah sampe anak kelas empat SD, entah yang cuma sekedar main hp atau pergi ke warnet tapi kan teknologi udah berkembang pesat. Yaudah kami akhirnya memikirkan kira-kira strategi yang tepat buat masyarakat Kulon Progo ini apa. Muncullah pikiran ngembangin KIE melalui berbagai media yang dekat dengan masyarakat. Jadi selain penyuluhan, terus ada deklarasi secara khusus dari BPPM, kami kuatkan lagi dengan pengembangan berbasis jaman now-nya. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

## 5. Menentukan Pesan

Pesan yang paling efektif digunakan dalam mengajak, mempengaruhi serta mengubah perilaku seseorang adalah pesan yang bersifat persuasif melalui bahasa. Biasanya sebuah instansi, lembaga, sebuah merek (produk) atau apapun itu akan membuat sebuah pesan baik hanya melalui simbol dan slogan yang sangat mudah di ingat oleh masyarakat (konsumen). BPPM sendiri memang memiliki pesan khusus melalui materi yang diberikan pada saat penyuluhan. Tetapi dalam pelaksanaan-nya setiap kabupaten memiliki pesan atau slogan masing-masing untuk di ingat dan menjadi ciri khas.

Untuk kami sih pesan itu tersampaikan pada saat nanti pemberian materi seperti pemahaman materi mengenai kesehatan reproduksi dan resikonya serta membangun remaja

yang sehat cerdas dan ceria. Semua materi itu kami rangkum kedalam tema “Bolehkah Remaja Kawin”. Jadi dari situ nanti kami coba memberikan pemahaman mulai dari informasi terkait kesehatan mereka, lalu akhirnya mereka akan tergerak dan pada tahapan untuk menjauhi yang namanya kawin karena sudah tau faktor-faktor penghambat untuk menjadi remaja yang sehat baik secara fisik maupun psikologis. Pesan ini kami sampaikan pada setiap kecamatan pematernya-pun bukan hanya dari kami tapi juga dari pak camat, jadi mereka mengenal bagaimana perhatian dari masing-masing elemen masyarakat yang berperan disana. Kemudian masing-masing kabupaten memiliki pesan tersendiri, karena kembali lagi PUP ini bukan hanya BPPM yang menjalankan programnya tetapi seluruh masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaannya, seperti untuk Kulon Progo ada slogan tersendiri. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurawati, M.Kes pada Jum’at 16 Maret 2018)

Pesan yang disampaikan dari Pemkab Kulon Progo sendiri tergolong unik. Karena pesan diletakkan pada media kipas, yang mana harapannya kipas tersebut dapat dibawa kemana-mana dan dibaca oleh teman-teman yang berada disampingnya atau yang ingin meminjamnya. Hal ini secara tidak sadar akan memberi tau pemahaman dan informasi kepada mereka melalui media kreatif dalam bentuk minimalis dan praktis. Berikut penjelasan Drs Mardiyana mengenai pesan “KUHIAS KENANGANKU” yang sedang marak digencarkan di Kabupaten Kulon Progo.

Kami sedang membuat pesan inspiratif mengenai program PUP ini. Kalo BPPM kan lebih ke materi menumbuhkan sikap menjadi remaja yang berencana. Nah kalau kami ada yang unik, jadi namanya “KUHIAS KENANGANKU” yang artinya perilaku hidup berwawasan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Lalu kami tuang lagi kedalam 10

aspek yang dapat kami jabarkan seperti apasih PUP ini lalu manfaat apa saja dari program PUP dan apa yang harus dilakukan. Tapi kami kemas menarik, singkat, mudah dipahami serta melalui media kipas. Hal inilah yang memang kami inginkan ajakan secara persuasif pokoknya. Nanti akan kami bagikan ini pada saat penyuluhan ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PUP. Entah itu dari PIK-R nya atau BKR nya. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

Diketahui bahwa suatu aktivitas komunikasi tentunya memang ingin menimbulkan suatu dampak atau efek tertentu. Dampak atau efek tersebut akan muncul ketika pesan yang disampaikan dianggap mampu membawa nilai positif dan dilakukan karena kemudahannya untuk di ingat. Dalam pesan “Kuhias Kenanganku” terdapat 10 aspek yang harus dilakukan remaja. Berikut 10 aspek tersebut guna mendukung efek yang akan ditimbulkan pada diri individu masing-masing remaja:

1. Remaja **mendewasakan usia perkawinan** (minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki) dan atau aktif dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
2. Pasangan Usia Subur (PUS) **memiliki 2 anak cukup**, laki-laki perempuan jangan dibedakan.
3. PUS **mengatur jarak kelahiran** minimal 3-4 tahun

4. PUS ber-KB **menggunakan alat kontrasepsi** modern (diprioritaskan MKJP: IUD, Implant, MOP, MOW)
5. Keluarga sebagai salah satu anggotanya **bekerja/memiliki usaha ekonomi produktif** dan atau menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
6. Keluarga yang memiliki balita **menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)**
7. Keluarga yang memiliki remaja **menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)**
8. Keluarga yang memiliki lansia **menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)**
9. Keluarga **mengoptimalkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga** (Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi dan Pendidikan, Ekonomi dan pembinaan Lingkungan)
10. Keluarga **tertib Adiministrasi Kependudukan.**

Dari 10 aspek atau arti pesan “Kuhias Kenanganku” yang harus di amalkan tersebut efek yang ditimbulkan bagi setiap individu sudah mengacu pada efek psikomotorik atau tujuan konatif, berikut penjelasannya:

- a. Efek/tujuan kognitif: pesan kuhias kenanganku dijabarkan kembali kedalam bentuk 10 aspek yang harus diamalkan oleh para penduduk Kulon Progo. Hal ini membuat pengertian dan pemahaman mengenai PUP dituangkan secara lebih mendetail dan informasi tersebar secara lebih khusus dan menyeluruh.
- b. Efek/tujuan afektif: pada pesan kuhias kenanganku 10 aspek tersebut dikemas secara menarik kedalam bentuk kipas. Hal tersebut membuat pesan mudah dibawa kemana-mana dan dibaca secara terus-menerus sehingga tumbuh dalam diri untuk menyampaikan pendapat atau bahkan perasaan tertentu dalam membahas program PUP.
- c. Efek/tujuan konatif: dengan adanya pesan yang disampaikan melalui media kreatif yaitu kipas, membuat masyarakat akan menerima informasi, memahami informasi dan akhirnya mengubah perilaku. Pesan mengenai program PUP di Kulon Progo sudah dituangkan kedalam sebuah lagu yang berjudul KUHIAS KENANGANKU ditahun 2017 lalu. Kemudian dalam pembuatan *video clip* masyarakat ikut bersama menyanyikan lagu tersebut. Mulai dari kalangan remaja, lansia, dewasa dan lainnya. Sehingga pesan tersebut tersampaikan dan akhirnya lekat kedalam jiwa individu masing-masing masyarakat.

Beberapa pandangan mengenai tujuan atau efek tersebut dikuatkan kembali dengan adanya hasil wawancara berikut:

Pesan yang kami sampaikan memang harapannya untuk mempengaruhi dan memberikan tiga efek secara sempurna kepada masyarakat. Pertama informasi menyeluruh dan jelas, itu lewat 10 poin ini. Poin tersebut-pun juga akan kami sampaikan pada saat penyuluhan. Kedua, lewat media kipas, informasi yang ada jadi dilihat berkali-kali. Akhirnya mereka ikut memberikan tanggapan walaupun nanti hanya sekedar membaca pasti mereka tau, lalu temannya pinjam jadi ikut baca juga terus mereka saling membicarakan. Akhirnya kuhias kenanganku ini juga bukan sekedar dibaca, tapi juga direalisasikan dihidupkan sehingga kami juga realisasikan pada lagu dan buat *video clip* ditahun lalu. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

Selain media kipas yang digunakan sebagai sarana kreatif, jejaring sosial youtube juga digunakan oleh dinas pemberdayaan KB Kulon Progo dalam mengajak masyarakat agar berperan serta. Berikut gambar pesan yang diletakkan pada media kipas dengan 10 poin penjelasan singkat pesan dan direalisasikan menjadi judul lagu serta sudah ditonton sebanyak 1,5k pada media *youtube*. Lagu ini sudah banyak dinyanyikan dan banyak di ikuti oleh kabupaten-kabupaten lain bahkan sudah sampai ke daerah-daerah yang ada di Indonesia

Gambar 3.1

Pesan “Kuhias Kenanganku” Melalui Media Kipas



Sumber : Dokumentasi dari kantor KB Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Gambar 3.2

Video Clip “Kuhias Kenanganku’ versi youtube



Sumber: Youtube Drs Mardiya

## 6. Seleksi tujuan utama komunikasi

Setelah target yang dikemukakan sudah menjadi landasan BPPM dalam mengembangkan strateginya. Tujuan-tujuan utama diseleksi kembali guna keefektifan program PUP yang akan dilaksanakan pada masing-masing kecamatan. Beberapa tujuan-tujuan utama tersebut menurut TOR (Term Of References) *Roadshow* PUP yang sudah penulis dapatkan dari BPPM DIY adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan
2. Meningkatkan komitmen remaja dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan
3. Meningkatkan dukungan dan komitmen *stakeholder* dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan.
4. Mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan termasuk ke media sosial.

Beberapa tujuan tersebut akan direalisasikan melalui penyuluhan dan deklarasi pada hari yang sama pada saat BPPM melaksanakan program PUP yang sasarannya memang kepada seluruh elemen remaja, *stakeholder* terkait dan advokasi pada bidang-bidang yang bersangkutan dengan ketahanan kesehatan remaja. Selain itu sesuai dengan salah satu poin yang menyukseskan sebuah strategi organisasi yaitu *determining what the objectives are for the*

*particular communication*, sebuah tujuan sudah jelas dibuat dan mudah dimengerti bagi BPPM sendiri ataupun *stakeholder* lainnya. Sehingga, tujuan komunikasi yang dibuat dipastikan menjadi landasan keberhasilannya program PUP ini.

#### 7. Mengorganisasikan komunikasi melalui pertemuan dengan mitra.

Pertemuan dengan mitra atau *stakeholder* terkait guna keberhasilan suatu program merupakan suatu kegiatan penting demi keberlangsungan program PUP tersebut. BPPM banyak mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah lintas kabupaten maupun dinas-dinas SKPD terkait. Berikut informasi mengenai hal tersebut:

Karena awal masalah dan sumber fakta yang udah kita jadikan TOR itu kita berikan ke DIM, lalu kami juga udah mulai tanya-tanya dan koordinasi lintas kabupaten. Gak berenti disana kami juga sebelum melaksanakan program deklarasi itu masih sering ke Saptosari, soalnya Saptosari kan turunnya jadi 0 itu udah beberapa tahun yang lalu. Kita tanya efektif atau tidak kalo lewat deklarasi, hambatannya gimana dan macam-macamnya. Lalu, kami setelah disetujui programnya awal kami mengadakan pertemuan lagi untuk pemantapan. Ya koordinasi lewat kantor KB masing-masing kabupaten lah. Kemudian deklarasi pertama muncullah pada saat itu Sultan sendiri yang membuka program PUP tersebut dan yang berkomitmen ataupun berdeklarasi yang ditingkat umum dulu seperti para bupati ataupun dinas kota Yogya. Pokoknya belum menjurus ke yang lebih inti yaitu masing-masing kecamatan. Terus kita lihat dan akhirnya kita laksanakan pada seluruh kecamatan. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut suatu awalan yang baik dimulai dari para pemilik dan pembuat peraturan sebagai penguat sebuah program yang ada di DIY sendiri sehingga perencanaan yang matang harus diperlihatkan jika ingin membuat program dalam skala besar. Selain itu untuk rapat koordinasi persiapan *roadshow* PUP sendiri pada bagian wilayah Kulon Progo bertepatan pada tanggal 14 Februari 2017.

#### 8. Perencanaan Kegiatan

Terlepas dari hal tersebut salah satu hal yang menyukseskan strategi adalah menentukan sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan (*deciding what resources are available for achieving those objectives*), seperti perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan jadwal kegiatan biaya ataupun sumber daya yang diperlukan. Dalam sebuah pertemuan dengan *stakeholder* yang dilaksanakan di kantor BPPM sendiri, ada beberapa perencanaan yang lebih mendetail untuk disampaikan dan dilaksanakan. Perencanaan tersebut berkaitan dengan jadwal dan lokasi yang tepat. Sebelum pertemuan tersebut berlangsung BPPM juga sudah membuat jadwal ke dalam TOR yang akan dibagikan. Selain pembicaraan mengenai pelaksanaan program BPPM juga menerima segala jenis tanggapan terkait bagaimana cara ataupun media yang tepat dalam mengkomunikasikan program

tersebut. Berikut lampiran jadwal ataupun lokasi yang tepat pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kulon Progo itu sendiri:

**Tabel 3.3**

**Perencanaan kegiatan *Roadshow* PUP di kecamatan yang ada di Kulon Progo**

No	Kecamatan	Tanggal	Tempat
1.	Temon	10 Mei 2017	Balai Desa Temon Kulon
2.	Panjatan	18 Juli 2017	Aula Kecamatan Panjatan
3.	Wates	8 Agustus 2017	Kecamatan wates
4.	Sentolo	29 Agustus 2017	Balai Desa Sukoreno
5.	Galur	5 September 2017	Balai Desa Kranggan
6.	Lendah	7 September 2017	Balai desa Jatirejo
7.	Samigaluh	3 Oktober 2017	Balai Desa Gerbosari
8.	Kokap	9 Oktober 2017	Balai Desa Hargorejo
9.	Nanggulan	11 Oktober 2017	Balai Desa Kembang
10.	Pengasih	2 November 2017	Balai Desa Sendangsari
11.	Kalibawang	8 November 2017	Balai Desa Banjarharjo
12.	Girimulyo	15 November 2017	Kecamatan Girimulyo

Sumber : TOR BPPM DIY Tahun 2017

Selain berdasarkan beberapa data di atas, hal-hal terkait pelaksanaan juga dibicarakan demi memperlancar jalannya program PUP. Berikut hasil wawancara mengenai media ataupun cara komunikasi tersebut:

Jadwal-jadwal sudah kami atur. Memang full satu tahun penuh deklarasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di DIY. Kami memang melaksanakan jadwal sesuai dengan laporan dari kecamatan juga kegiatan ini enaknya di bulan keberapa tanggal berapa dan lainnya. Lalu kami juga membuat gak satu bulan full di kabupaten Gunungkidul terus misalnya, soalnya kan kecamatan di DIY ada 78 biar lebih seperti rekreasi jadi 1 bulan full di kecamatan yang berbeda-beda dan dari kabupaten yang berbeda-beda. 2017 kami terus turun kelapangan dan mengadakan deklarasi, pokoknya full pake mobil dinas. Untungnya ada siap sedia mobilnya (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Selasa 2 Januari 2018)

Selain berdasarkan wawancara tersebut, pemilihan media yang tepat mulai dari awal adanya program PUP sampai nanti di berlaksanakannya program PUP selama setahun dijelaskan oleh Bapak Heru seperti sebagai berikut:

Sebelum kami melaksanakan deklarasi kami sudah pengenalan program terlebih dahulu melalui ya kayak ada pasang baliho gitu, iklan di TV punya BPPM pusat juga ada. Tapi lebih ke bahaya pernikahan dini sih. Jadi lewat media kreatif dulu terus lewat tatap muka atau ya penyuluhan deklarasi itu. (Hasil Wawancara dengan Bapak A Heru Triyono, SKM kepala Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi pada Kamis 25 Januari 2018)

Melalui beberapa media tatap muka, ataupun media yang memanfaatkan teknologi sebagai pertimbangan digunakan oleh BPPM sebagai cara dalam mensukseskan program PUP ini. Media ini dianggap mampu menysasar ke masyarakat di berbagai lapisan.

## 9. Aktivitas Penganggaran

Sebuah penyusunan aktivitas penganggaran mampu dijadikan tolak ukur sebuah keberhasilan. BPPM DIY menjalankan programnya dengan menggunakan dana dari APBD DIY TA 2017 melalui DPA BPPM DIY. Dana ini diperlukan untuk beberapa penunjang dalam proses kegiatan pada masing-masing kecamatan yang ada di DIY. Berikut kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan melalui anggaran pada masing-masing kecamatan yang sudah dijelaskan pada TOR *Roadshow* PUP tersebut:

1. Honor peserta
2. Makan dan minum
3. Spanduk
4. Lembar deklarasi
5. Leaflet dan buku saku KRR (drop DIY)
6. Sewa ruang
7. Sewa meja – kursi
8. Nara sumber dan moderator

Melihat penjelasan tersebut, dana yang dianggarkan dibagi ke 78 kecamatan yang ada di DIY. Anggaran ini berlaku hanya pada saat deklarasi atau kegiatan penyuluhan dari BPPM DIY sendiri.

## 10. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi yang BPPM laksanakan adalah melalui kantor KB masing-masing Kabupaten. Berikut penjelasan Ibu Retno terkait evaluasi tersebut.

Evaluasi akan dilaksanakan pada tahun ini yaitu 2018. Rencananya pada bulan Februari akhir atau Maret awal. Sistem evaluasinya sama dengan awal merencanakan program. Ada rapat koordinasi lagi terkait program PUP. Tapi lebih ke sistem pelaksanaannya yaitu *roadshow* ini. Jadi evaluasi ditempat bukan evaluasi jangka panjang. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Selasa 2 Januari 2018)

### b. Pengorganisasian (Organizing)

Pada tahapan manajemen dikenal sebuah pengorganisasian yang bertujuan untuk melancarkan keberlangsungan program. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seleksi mitra dan pertemuan kembali bersama mitra telah dilakukan pada saat perencanaan. Pada tahap pelaksanaannya. Pengorganisasian dilakukan lebih terstruktur lagi mulai dari lapisan yang paling bawah. Sesuai dengan sasaran BPPM sendiri yaitu remaja secara khusus dan *stakeholder* ataupun instansi pembuat keputusan secara umum. maka pengorganisasian program PUP ini dilakukan melalui beberapa tahap. Berikut tahapan pengorganisasian tersebut

1. Pengorganisasian melalui rakor dengan penguat jejaring program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Rakor persiapan *roadshow* ini dilaksanakan secara lebih khusus dengan mengundang dinas-dinas terkait dan membahas mengenai pelaksanaan program. BPPM mengundang sejumlah dinas dan itu terdiri dari masing-masing kabupaten, perwakilan kantor KB masing-masing, serta kecamatan masing-masing. Selanjutnya memberi tau surat edaran bahwa Sultan menyetujui adanya program PUP yang dikemukakan oleh BPPM dan memang masih menjadi kekhawatiran bagi seluruh pihak dengan adanya masalah pernikahan dini yang semakin meningkat tersebut. Akhirnya pada pengorganisasian ini lebih kepada *stakeholder* dan hanya sebatas rakor didalam ruangan untuk memantapkan pelaksanaan.

2. Pengorganisasian pelaksanaan deklarasi pertama sebagai contoh kepada seluruh kecamatan lainnya

Pada pengorganisasian ini dilaksanakan kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dibuka langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pelaksanaan kampanye ini bersamaan dengan Hari Remaja Internasional (*Youth International Day*) pada tanggal 03 Agustus 2016 di Gor Amongrogo. Kegiatan ini diikuti oleh 450 orang yang mana pesertanya merupakan beberapa komponen remaja dan lembaga kepentingan masyarakat seperti Forum PIK R/M, duta mahasiswa, Forum Anak

Daerah, Kwarda, Youth Forum, Youth Association, YOTHA, Karang Taruna, KNPI, Organisasi Keagamaan Remaja, Remaja Difabel, Kelompok Remaja Jalanan, Remaja Sekolah dan pendamping, Serta dihadiri oleh 50 unsur instansi atau lembaga penyelenggara program KRR antara lain, SKPD terkait tingkat DIY, SKPD terkait tingkat kabupaten atau kota, dan FP2KRR DIY serta didukung oleh Gubernur DIY dan para Bupati atau Walikota se-DIY. Kegiatan tersebut sebagai simbol bahwa dukungan untuk melaksanakan program deklarasi yang lebih mendasar lagi yaitu ditingkat kecamatan mampu dinilai efektif dan berjalan maksimal. Sehingga cara deklarasi dapat dianggap tepat jika ingin melaksanakan program PUP sendiri.

**Gambar 3.3**  
**Pelaksanaan Kampanye PUP Pertama**



Sumber: [bppm.jogjaprovo.go.id](http://bppm.jogjaprovo.go.id) (diakses pada 27 Maret 2018)

3. Pengorganisasian dengan masing-masing lembaga atau instansi masing-masing kecamatan

Pada tahapan pengorganisasian ini BPPM mulai *mengkroscek* kembali perlengkapan yang dibutuhkan pada masing-masing kecamatan dan jadwal yang sudah dibagikan. Setiap kecamatan akan mempersiapkan tempat dan segala hal yang sudah dilist dan dibutuhkan selama pelaksanaan. Kemudian BPPM DIY juga sudah mulai megorganisasikan dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan program KRR seperti pematapan materi dan *roadshow*.

4. Pengorganisasian dengan kantor KB atau dinas PMDPPKB kabupaten setempat sebagai tolak ukur dan pusat *controlling* program PUP

Setelah deklarasi dilaksanakan pada masing-masing kecamatan, BPPM menyerahkan program PUP sepenuhnya kepada masing-masing dinas ataupun bidang KB setempat. Hal ini dikarenakan setiap peserta yang datang sudah diarahkan untuk berkomitmen dan ikut turut serta menanggulangi permasalahan pernikahan dini tersebut. Setiap lembaga yang sudah berkomitmen membuat sebuah kegiatan positif sendiri untuk membantu program PUP tersebut dengan cara yang kreatif dan menarik sebagai upaya mengajak masyarakat memahami mengenai program ini.

**c. Mengkomunikasikan (Communicating)**

Tahapan mengkomunikasikan dalam teori manajemen komunikasi dengan kata lain adalah tahapan pelaksanaan program. Dalam hal ini BPPM DIY menggunakan beberapa cara dalam mengkomunikasikan program PUP agar masyarakat mengerti dan memahami mengenai program tersebut. Beberapa cara yang dinilai efektif oleh BPPM adalah sebagai berikut:

1. Melalui Penyuluhan (Rangkaian Road Show)

Sebelum ditujukan kepada tahapan deklarasi, BPPM DIY akan memberikan penyuluhan dengan berbagai macam materi. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari yang sama pada saat masing-masing kecamatan akan melaksanakan deklarasi. Pengisi materi penyuluhan tersebut antara lain dari pihak BPPM sendiri dengan tema “Bolehkah Remaja Kawin” lalu “Pemahaman Kespro dan Resikonya’ oleh puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja) dan “Membangun Remaja Sehat Cerdas dan Ceria” oleh camat masing-masing. Tiga materi penyuluhan tersebut akan dikemas dalam bentuk *talkshow* dan dimoderatori oleh tim PKB. Proses penyuluhan atau sosialisasi ini dianggap efektif karena dengan media tatap muka dan interaksi secara langsung BPPM dapat memberikan pengertian yang sama terhadap para sasaran mereka. Selain itu pada saat penyuluhan-pun BPPM akan memberikan sesi tanya jawab yang mana nanti

seluruh peserta baik itu dari tingkat remaja maupun lembaga daerah di tingkat kecamatan ataupun desa (kelurahan) dapat mengemukakan hal yang masih membingungkan dan masih menjadi hambatan mereka dalam mengajak masyarakat menanggulangi pernikahan dini. Sehingga media penyuluhan ini akan menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan program PUP tersebut. Berikut hasil wawancara yang menguatkan penjelasan diatas:

Kan pelaksanaan dihari itu kami mengkomunikasikannya dengan berbagai cara. Nah mulai dari awal pra pembukaan kami mengadakan penyuluhan dengan kata lain sosialisasi dengan tiga narasumber terkait. Dari saya sendiri sebagai perwakilan BPPM DIY, kemudian dari puskesmas konseling remaja atau PKPR dan dari Camat masing-masing. Materinya juga dikemas menarik, soalnya kalo materinya gak menarik yang dijadikan target atau pesertanya sendiri nanti gak faham dan ngantuk. Kemudian penyuluhan ini pun juga bisa melihat sebenarnya forum remaja daerah dan lembaga terkait sudah berperan sejauh mana terkait membatasi perkawinan didaerahnya, ya melalui tanya jawab itulah (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Terlepas dari hal tersebut, masing-masing kantor KB Kabupaten seperti Kabupaten Kulon Progo juga sering melaksanakan penyuluhan dalam mengkomunikasikan program PUP. Penyuluhan ini bersifat lebih menyeluruh dibandingkan dengan sosialisasi BPPM yang hanya dilaksanakan pada saat deklarasi saja. Penyuluhan yang dilaksanakan menuju ke elemen paling dasar dan menjangkau seluruh khalayak seperti kepada ibu-ibu, remaja dan masyarakat secara

umum. Tetapi penyuluhan tidak dapat dilaksanakan berkali-kali pula karena terbentur anggaran dana untuk pelaksanaannya.

Di Kulon Progo, kami sering melaksanakan penyuluhan seperti pada tingkat desa misalnya kami memberikan materi pada saat posyandu, atau ada acara desa kami diundang. Tapi ya kalo misalnya kita yang mengadakan gak bisa sering-sering karena anggaran dan dana kan juga terbatas. Bukan hanya untuk program PUP, kayak misalnya ke sekolah-sekolah kan kita butuh seminar *kits* terus kita juga butuh anggaran tak terduga dan lain-lainnya. Sebenarnya kami juga penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih menjurus kan tapi ya gitu kami penyuluhan semua dana sendiri kalo BPPM anggarannya ya khusus pada saat deklarasi perkecamatan itu. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

Selain dari beberapa hasil wawancara tersebut, Berikut beberapa lampiran data dokumentasi saat BPPM DIY mengadakan penyuluhan mengenai program PUP pada tingkat kecamatan yang ada di DIY. Dari data dokumentasi tersebut terlihat antusiasme peserta mulai dari remaja maupun perwakilan institusi atau lembaga yang terkait dengan KRR dan beberapa narasumber yang turut mengisi materi pada saat penyuluhan berlangsung, baik itu dari puskesmas PKPR ataupun Camat dari masing-masing kecamatan yang ada.

**Gambar 3.4**  
**Salah Satu Contoh Penyuluhan Program PUP di Kecamatan yang ada di**  
**DIY**



Sumber: Dokumentasi BPPM DIY Tahun 2017

**Gambar 3.5**  
**Salah Satu Contoh Penyuluhan Program PUP di Kecamatan yang ada di**  
**DIY**



Sumber : Dokumentasi BPPM DIY Tahun 2017

## 2. Melalui Deklarasi (Rangkaian Road Show)

Deklarasi dilaksanakan pada masing-masing kecamatan yang ada di DIY. Deklarasi sendiri mengundang 125 orang yang mana 85 orang merupakan forum remaja yang ada pada masing-masing kecamatan tersebut dan 40 orang perwakilan terkait instansi atau lembaga yang berkepentingan di daerah tersebut. Deklarasi ini bertempat pada lokasi yang sudah ditentukan dan dengan jadwal yang sudah disediakan. Inti dari deklarasi ini adalah terciptanya komitmen dari masing-masing peserta untuk berperan serta dalam upaya mendewasakan usia perkawinan. Ada empat tahapan dalam deklarasi ini, berikut tahapan tersebut:

- a. Pembacaan Deklarasi PUP Remaja
- b. Pembacaan Komitmen Bersama para Penyelenggara Program KRR
- c. Penandatanganan Kesepakatan Bersama
- d. Deklarasi Remaja Secara Bersamaan

Berikut penjelasan mengenai empat tahapan tersebut:

Jadi deklarasi kan komitmen yang disepakati dibacakan dan diresapi dalam-dalam agar bukan hanya sekedar lisan tetapi dilakukan secara aktual. Makanya kami juga susun rapih deklarasi ini seperti apa pelaksanaannya. Jadi kami buat draft deklarasi pada kain kanvas atau se-kualitas selanjutnya kami list dengan kayu pigura dan tulisan cetak printing. Disana nanti akan ada tulisan misalnya untuk *stakeholder* atau penggiat KRR “kami akan bersepakat untuk bla bla bla” itu ada semua nanti disitu jadi berkomitmen sama halnya dengan remaja. Jadi

awal mulai pembacaan dulu kesepakatan remaja dalam membantu program PUP selanjutnya komitmen lembaga atau *stakeholdernya*, sehabis itu mereka tanda tangan semuanya ke dalam draft deklarasi itu dan akan bersama-sama membaca komitmen mereka kembali. Harapannya kan luaran program ini komitmen sudah, faham pesan kalau menikah yang baik atau perkawinan yang dewasa yaitu wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun sudah, dan mereka sepakat untuk sama-sama membantu dalam mengupayakan program PUP juga sudah. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Draft deklarasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, digambarkan kedalam kertas sebagai sketsa dan kurang lebihnya seperti ini:

**Tabel 3.4**

**Sketsa Draft Deklarasi yang akan Dibuat Dalam Ukuran 1m x 1,25 m**

<p style="text-align: center;"><b>KOMITMEN BERSAMA PARA PENYELENGGARA PROGRAM KRR (KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA)</b></p> <p>Kami seluruh penyelenggara program KRR di Kecamatan.....bersapakat untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan pendidikan KRR yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka melindungi dari resiko seksual dan reproduksi dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab</li><li>2. Memberikan pelayanan KRR yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mencegah, mengobati dan mengurangi risiko seksual dan reproduksi dalam menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab</li><li>3. Mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program KRR dalam rangka menjamin akses, pemberian masukan, dan saran, serta penerimaan manfaat dari program KRR secara maksimal</li><li>4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggara KRR agar menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, non diskriminasi, tidak menghakimi dan kesetaraan gender.</li></ol>
--

5. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak reproduksi remaja				
Kecamatan....., tgl 2017				
TTD				
CAMAT,	KAPOLSEK,	DANRAMIL,	KA. PUSKESMAS,	KA. KUA,
KOORD. PKB,	Dst			
KADES/LURAH A,	KADES/LURAH B,			
Dst				

Sumber: TOR BPPM DIY tahun 2017

**Tabel 3.5**

**Sketsa Draft Deklarasi yang akan Dibuat Dalam Ukuran 1m x 3 m**

<p><b>PETISI REMAJA DALAM Mendukung PROGRAM PUP DI KECAMATAN</b></p> <p>.....</p> <p>Kami, seluruh remaja di Kecamatan ..... bersepakat untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung terwujudnya usia ideal perkawinan diatas 21 tahun bagi perempuan dan diatas 25 tahun bagi laki-laki</li> <li>2. Siap menjadi <i>agent of change</i> dalam penyelenggaraan program KRR</li> <li>3. Siap mendukung aksi pencegahan tindak diskriminasi dan pelecehan terhadap remaja</li> <li>4. Siap menjadi <i>peer counselor</i> bagi temanteman remaja sebaya</li> <li>5. Secara aktif terlibat dalam setiap tahapan program KRR, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi</li> </ol> <p style="text-align: right;">Kecamatan....., tgl</p> <p style="text-align: right;">Atas nama remaja kecamatan .....</p> <p>TTD</p>
---

Sumber : TOR BPPM DIY Tahun 2017

Terlepas dari hal tersebut berikut beberapa dokumentasi deklarasi yang dilaksanakan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh remaja setempat dan *stakeholder* instansi KRR dari BPPM sendiri.

**Gambar 3.6**  
**Deklarasi Program PUP di Kecamatan Samigaluh**



Sumber: Dokumentasi Dinas PMDP2KB Kulon Progo Tahun 2017

**Gambar 3.7**  
**Deklarasi Program PUP di Kecamatan Sentolo**



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Sentolo Tahun 2017

### 3. Melalui Media Sosial

Dalam pelaksanaannya BPPM DIY sendiri menyerahkan program PUP dalam jangka panjang kepada dinas pemberdayaan KB setempat. Untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo secara khusus penginformasian program PUP dikemas secara menarik melalui media sosial youtube dan facebook. Konten yang ditampilkan juga cukup unik dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui youtube terdapat beberapa video sebagai media advokasi dari Pemkab Kulon Progo sendiri yang bekerjasama dengan BPPM DIY. Pembuatan video ini diproduksi dengan melibatkan beberapa siswa atau remaja yang akan tumbuh menjadi generasi berencana. Berikut cuplikan video dari lagu yang berjudul “Generasi Berencana” tersebut:

**Gambar 3.8**  
**Cuplikan Video Youtube Produksi BPPM dan Pemkab Kulon Progo**



Sumber: Youtube ASPeMusik (Drs Mardiya)

Selain lewat youtube, jejaring sosial yang saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan remaja dan teknologi yaitu facebook juga turut menjadi sasaran atau media penghubung yang dimanfaatkan oleh dinas pemberdayaan KB dan Dalduk setempat. Postingan-postingan yang diunggah dinilai mengikuti perkembangan zaman dalam menarik minat followers agar melihat postingan tersebut. Halaman facebook Dalduk Kulon Progo ini juga turut membagikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program KKBPK selain mengunggah keterlibatan mengenai kenaikan jumlah penduduk akibat tidak taunya PUP. Berikut beberapa postingan kreatif yang ada pada laman facebook Dalduk Kulon Progo

### Gambar 3.9

#### Salah Satu Postingan di Facebook Dalduk Kulon Progo



Sumber: Halaman Facebook Dalduk Kulon Progo Tahun 2018

**Gambar 3.10**

**Salah Satu Postingan di Facebook Dalduk Kulon Progo**

 **Dalduk Kulonprogo** menambahkan 3 foto baru.  
28 Februari pukul 22:37 · 🌐

Hati kita pasti teriris-iris melihat pergaulan dan ungkapan anak-anak kecil zaman sekarang terhadap lawan jenisnya. Sungguh berat tanggung jawab kita untuk meluruskannya sekaligus mengarahkan mereka agar menjadi generasi yang berencana.



Sumber: Halaman Facebook Dalduk Kulon Progo Tahun 2018

4. Melalui Buku Saku

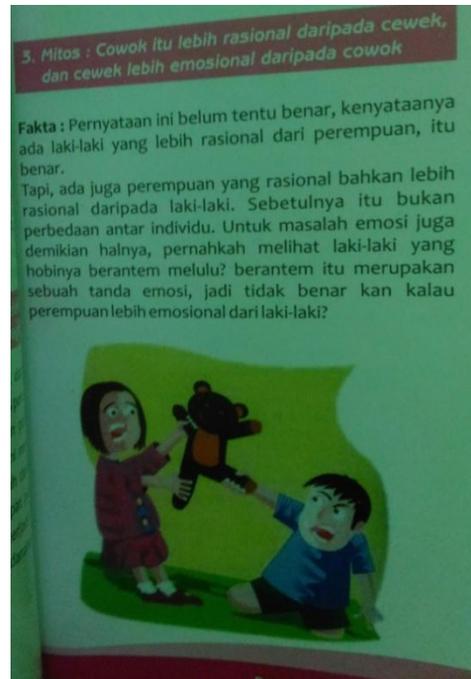
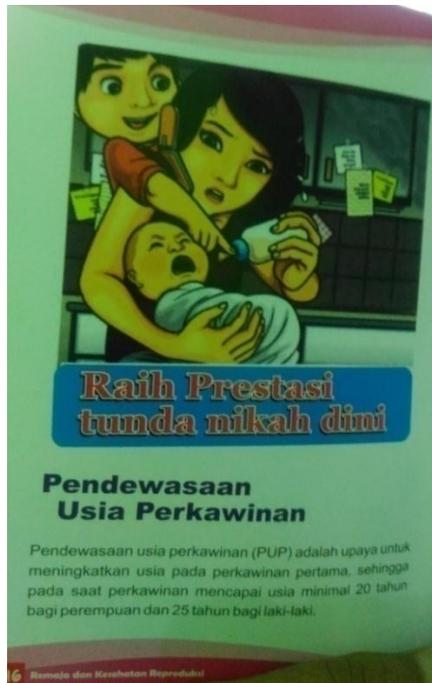
Media komunikasi yang selanjutnya dikemukakan oleh BPPM adalah melalui buku saku. Buku saku ini akan dibagikan pada remaja yang hadir pada saat penyuluhan atau deklarasi tersebut. Buku yang diberikan, dikemas menarik dengan sampul yang unik dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh mereka. Isi dari buku saku tersebut juga memuat tentang berbagai pengetahuan bagi remaja dalam memahami kesehatan reproduksi dan cara berperilaku yang baik dan benar, sehingga kemampuan pemahaman dan perilaku yang telah dimiliki tersebut diharapkan dapat menjadi contoh, penggerak, kader maupun agen perubahan kepada sesamanya. Selain itu, buku saku ini dikemas

kecil dengan harapan mudah dibawa kemana-mana. Berikut gambar dari cover dan isi buku saku tersebut:

**Gambar 3.11**  
**Cover Buku Saku PUP**



**Gambar 3.12**  
**Contoh Isi Buku Saku PUP**



Sumber: BPPM DIY Tahun 2018

Dari berbagai macam media yang telah dijabarkan diatas baik seperti media tatap muka yaitu penyuluhan dan deklarasi ataupun media sosial dan buku, BPPM telah mengusahakan yang terbaik agar seluruh penyampaian informasi mengenai program PUP dapat dimengerti dan dipahami dikedepannya. Selain itu dengan cara-cara unik yang dikembangkan oleh masing-masing kabupaten setempat dapat menjadi suatu pemberdayaan masyarakat yang menuju kearah positif dan mengetahui lebih detail mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja secara khusus.

**d. Pengawasan (Controlling)**

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh BPPM tidak terlalu spesifik dikarenakan program PUP dalam jangka panjang diserahkan secara langsung kepada dinas pemberdayaan KB masing-masing Kabupaten. BPPM sendiri bergerak sebagai pioner yang melakukan program sebagai penanggulangan pernikahan dini dengan cara deklarasi. Untuk tahapan selanjutnya langsung dialokasikan kepada masing-masing Pemkab setempat. Berikut hasil wawancara mengenai sistem *controlling* terhadap program PUP ini:

Untuk mengontrol sendiri kami akan menunggu laporan dari masing-masing dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sering disingkat Dinas PMDPPKB. Melalui dinas ini kami akan menanyakan bagaimana perkembangan dari pelaksanaan

program PUP. Apakah kasus pernikahan dini di kabupaten tersebut berkurang atau tidak, kami akan mengontrollnya dari laporan yang masuk ke kami. Intinya kami sudah berupaya melalui deklarasi. Kami anggap sih berhasil dan bisa menurunkan angka pernikahan dini. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Selain berdasarkan penjelasan Bu Retno di atas. Untuk sistem *controlling* beberapa kabupaten juga sudah ada yang berbeda yaitu pada tahapan perilaku atau tindakan secara langsung di lapangan. Contohnya seperti Kabupaten Gunung Kidul ataupun Kulon Progo. Untuk Gunung Kidul sendiri sebelum BPPM melaksanakan program PUP dengan media deklarasi beberapa kecamatannya sudah terlebih dahulu melaksanakan program tersebut. Sehingga untuk komitmen dan pengawasannya sudah berbeda dengan kabupaten lainnya. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

Kalo misalnya mau melihat sistem pengawasan di Gunung Kidul itu berbeda dengan kabupaten lainnya yang masih adem ayem. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama dinas Gunung Kidul sendiri mereka udah mulai kelihatan sih upayanya. Mereka mau ngebentuk SATGAS. Jadi wilayah Gunung Kidul ini semakin banyak pantai-pantai kecil yang mulai jadi destinasi wisata nah SATGAS ini nanti akan mengecek dan patroli langsung kalo misalnya liat anak berdua-duan di pantai itu ada batasnya. Kalo misalkan nginep gitu kan bukan mukhrim bisa terjadi hal-hal yang macem-macem makanya Gunung Kidul buat SATGAS. Itu lah keunikan Gunung Kidul yang daerahnya udah melakukan deklarasi duluan dan udah kelihatan kerja dalam pengawasan remajanya. (Hasil Wawancara dengan Dra Endah Wahyuni, Kepala Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan (PKOP) pada Kamis 25 Januari 2018)

Untuk wilayah Kulon Progo sendiri sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas PMDP2KB adalah sebagai berikut:

Kalo masyarakat Kulon Progo pengawasan dari kami ya gak terlalu formal sih. Kulon Progo sendiri kan kami ada peraturannya juga, kalo ada pasangan yang ingin menikah dan itu dibawah umur harus ada izin terlebih dahulu lewat pengadilan agama itupun harus dapat surat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di DinsosP3A. Jadi emang sengaja dibuat agak ribet biar misalnya orang tua gak seenaknya nikahin anak yang misalnya ngerasa udah baligh anaknya dan segala macam sumbernya. Selain itu kami juga sering misalnya Tanya-tanya ke KUA nya sambil santai sih. Gimana keadaan kecamatan ini ada yang ngajuin nikah nggak? Tapi ya itu mereka udah berusaha ngebatasi, lah kasus nya kehamilan tidak diinginkan.apa boleh buat. Masa sudah hamil tidak dinikahkan. Soalnya kadang juga misalnya anak ditinggal sama orang tua ke sawah atau ngekos sendirian ya mereka melakukan hubungan intimnya dirumah atau dikos mereka. Atau warnet yang di buat biliknya tinggi kita gak ada yang tau apa yang dilakukan anak-anak disitu. Makanya kami mulai mengontroll juga tapi ya masih ditempat umum. Kayak di alun-alun itu selalu ada polisi yang mantau tapi kalo udah jam malam misalnya ditegor kalo ada yang dua-duaan trus masih pake baju santai aja polisinya biar friendly istilahnya. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh BPPM DIY tergantung dari bagaimana masing-masing kabupaten itu bertindak dan nantinya akan melapor kepada BPPM. Hal-hal yang dilakukan-pun dengan cara yang mungkin bisa saja berbeda-beda pada setiap kabupatennya.

**e. Penilaian (Evaluating)**

BPPM DIY mengemukakan bahwa cara yang digunakan oleh mereka adalah sama halnya pada saat rakor. Jadi mereka akan mengundang masing-masing perwakilan kabupaten sebagai tolak ukur keberhasilan program mereka. Selain itu setiap kabupaten akan mengemukakan hambatannya selama pelaksanaan deklarasi maupun dalam pelaksanaan jangka panjangnya. Evaluasi ini dilakukan setelah BPPM menyelesaikan programnya pada 78 kecamatan yang ada di DIY. Berikut penjelasan mengenai proses evaluasi dari BPPM dengan perwakilan lintas SKPD tersebut:

Evaluasi sama modelnya kayak rakor kemarin. Jadi kami mengundang kantor KB masing-masing dan perwakilan lintas SKPD aja. Hasil evaluasinya menurut kami sih berhasil. Cara deklarasi menurut mereka efektif, kan yang kami tonjolkan itunya. Kalo usaha-usaha lain kan tergantung dari kabupaten masing-masing gimana bertindaknya. Deklarasi ini juga dicontoh sama beberapa desa kok. Bahkan ada yang inisiatif sendiri untuk mengadakan deklarasi ini. Tapi kembali lagi kan berhasil atau tidaknya program tersebut bukan hanya dilihat dari angka pernikahan dininya turun atau enggak, kan ada faktor pendukung lainnya kayak lembaga yang terkait KRR yang sudah berdeklarasi mereka jalan atau tidak untuk sama-sama mengupayakan. Jadi ya kami butuh dukungan mereka juga. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri berikut evaluasi yang sudah disampaikan oleh Drs Mardiya terkait KIE maupun upaya di lapangannya.

Cara evaluasinya ya dilihat angka pernikahan dininya. Kami tau pernikahan dini di dua bulan pertama yaitu januari dan februari ini sudah mencapai 10 pasangan tapi itu karena kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dan ditelusuri mereka juga gak terlalu mengerti tentang PUP. Tapi memang itu tugas kami untuk memberikan pemahaman mengenai kespro kepada masyarakat. Selanjutnya kami juga pernah iseng-iseng membuat sebuah eksperimen yang unik kepada sekitar masyarakat Kulon Progo, itu dilakukan kemarin setelah program PUP dijalankan kami berkeliling ke masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, tukang becak, guru, koramil, semua kami tanya yang berkaitan dengan pernikahan dini, terus kespro, napza, hiv/aids, maupun PUP. Kami mengetes seberapa tahu mereka tentang program tersebut. Dan ternyata yang mengetahui hanya sebagian saja seperti pelajar SMP maupun SMA yang lainnya ya masing kurang faham sehingga pengertian dan advokasi harus dilaksanakan lebih menyeluruh lagi nampaknya. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

Selain beberapa penjelasan di atas, terdapat beberapa tanggapan dari masyarakat Kulon Progo terkait program PUP yang telah dilaksanakan oleh BPPM DIY tersebut. Tanggapan tanggapan ini datang dari beberapa orang yang terlibat pada sistem deklarasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Program PUP saya taunya malah dari BKKBN karena sudah ketahun berapa gitu. Kalau misalnya suatu program hanya sebatas dilaksanakan sekali dan itu melalui deklarasi itu sangat tidak efektif. Mungkin saya tahun lalu ikut, tapi saya lupa. Lah kalo misalnya ada penyuluhan cuma sekali-pun itu juga termasuk tidak efektif. Kayak misalnya waktu tahun lalu juga ada dari BNN DIY itu mereka juga ngadain deklarasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sampai sekarang kami sudah lupa,

malah kayaknya sama saja BPPM ini. Untungnya kami misalnya kayak di SMA 2 Wates ini emang ada pemahaman mengenai kespro di kelas XI. Jadi mereka itu kami pantau juga karena dulu ada kasus KTD gara-gara tinggal dikosan. Makanya kami kasih pemahaman ke seluruh murid sebagai upaya pencegahan dalam kasus yang sama. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rr.Esti Sutari,S. Pd, M.Si, Guru BK SMA N 2 Wates pada 26 Maret 2018)

Sebagai sasaran utama BPPM yaitu pelajar, penulis juga mencari tanggapan dari pelajar khususnya salah satu perwakilan PIK-R yang ada di Kabupaten Kulon Progo. PIK-R Perabangsa penulis pilih sebagai bahan pertimbangan karena PIK-R ini sudah juara Nasional kedua dan menjadi PIK-R yang direkomendasikan oleh BPPM pada saat wawancara.

Deklarasi dari BPPM bagus sih kak tapi kalau menurut saya program sebenarnya tergantung dari isinya pengaruh buat pelajar itu sendiri bagaimana, kalau dari kebanyakan deklarasi kurang mengena untuk pelajar itu sendiri. Karena kadang deklarasi hanya diungkapkan saja setelah itu selesai. Sedang pelajar itu kebanyakan gak menghiraukannya. Mungkin untuk efektifnya lebih ke cara-cara yang mudah untuk diteladani, kan remaja yang ada di Kulon Progo kebanyakan kasus pernikahan dininya akibat KTD nah hal tersebut menurut saya terjadi karena kurangnya edukasi tentang kespro dan bahaya melakukan seks pra nikah. Untuk itu kami PIK-R sendiri sering mengadakan sosialisasi terkait kespro tetapi melalui kemasan yang berbeda. Misalnya untuk siswa SMP kami sisipkan pesan mengenai kespro dalam bentuk teater dan range yang lebih luas kami memiliki terobosan melalui film pendek ang kami unggah ke youtube. Filmnya berjudul 'Garis Dua'. Jadi semua program kita-pun pyur gak dari BPPM atau BKKBN semua dari PIK-R kita yang bertindak. (Hasil Wawancara dengan Afifa Dzaky Nismarani Supriyono, pelajar dan Ketua PIK-R Perabangsa periode 2016-2017 pada Kamis 29 Maret 2018)

Untuk tanggapan selanjutnya datang dari warga desa Bumirejo yang merupakan Kader PKK Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

Memang pernah ada penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini itu diberikan kepada kami dan itu dari puskesmas. Tapi kalo dari BPPM sendiri nampaknya belum ada, saya juga belum tau mengenai program PUP. Kalo mars KB saya tau. Tapi lagu kuhias kenanganku juga ndak tau (Hasil Wawancara dengan Maryati, Kader PKK dan Posyandu Kec Lendah pada Minggu 25 Maret 2018)

Kemudian tanggapan mengenai *roadshow* BPPM ini juga hadir dari KUA Kecamatan Pengasih. KUA ini merupakan KUA dengan batas wilayah paling besar dan jumlah masyarakat yang banyak. Selain itu data mengenai jumlah kasus pernikahan dini dua bulan terakhir yang ada di Kulon Progo datang dari Kecamatan tersebut. Sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

Kulon Progo sendiri paling luas memang wilayah Kecamatan Pengasih jadi berita yang masuk rata-rata dari kecamatan kami ya wajar. Kemarin baru ada deklarasi kembali dari Rifka Annisa dibantu sama lembaga sosial atau dinas sosial. Hal itu sebagai pencegahan kembali sih. Sebenarnya media deklarasi boleh saja dilaksanakan cuma seharusnya pengontrollan tindak lanjut lebih utama kepada para pelajar. misalnya BPPM ke sekolah-sekolah mengadakan penyuluhan. Sepertinya itu akan lebih efektif guna keberhasilan program. Selain itu sebenarnya KUA sendiri memang mengikuti peraturan pemerintah tetapi pasti KUA tetap memfasilitasi pernikahan ketika masyarakat sudah di izinkan dari pengadilan Agama yang sudah direkomendasikan tersebut. Kemudian jika ingin membandingkan jumlah data selama tiga bulan pertama ini yang menikah dini dengan tiga bulan pertama pada tahun lalu juga bisa. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan PUP. Berikut data yang didapatkan selama tiga bulan pertama ini

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Orang yang Menikah Dini pada Bulan Januari-  
Maret kurang dari umur PUP**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
2017	5	14
2018	4	11

Sumber : KUA Kecamatan Pengasih

Dari data tersebut lumayan lah berkurang tapi ya gak 0 kayak Saptosari yang jadi contoh. Susah soalnya, sebabnya juga KTD. Tapi tetep semoga aja berkurang jumlahnya. Walaupun kita gak tau itu karena faktor BPPM atau bukan (Hasil Wawancara dengan Ahmad Wardani, Penghulu KUA Kecamatan Pengasih pada 5 April 2018)

Setiap tanggapan atau-pun masukan yang diberikan kepada BPPM harapannya dapat menjadi evaluasi bagi mereka. Berkaitan dengan penjelasan tersebut sesuai dengan hal yang dapat menyukseskan sebuah strategi organisasi suatu reputasi akan dibangun sesuai dengan apa yang telah organisasi tersebut laksanakan sebelumnya. Menurut kredibilitas suatu organisasi menentukan reputasi atau *diagnosing the organization's reputation* sangat diperlukan dan diciptakan dari penerima program tersebut. Untuk itu penyajian data atau menarik perhatian kepada elemen mendasar agar mengerti lebih baik lagi mengenai BPPM perlu dilakukan dengan berbagai cara yang dekat dengan masyarakat secara luas. Hal ini harus dilakukan agar reputasi BPPM dimata masyarakat dapat tercipta dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman yang luas.

#### **f. Strategi Komunikasi pada Institusi Pemerintahan**

Strategi komunikasi dalam sebuah organisasi akan membuat suatu pengertian dan pemikiran yang semula hanya dimiliki organisasi tersebut menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Dalam suatu organisasi, institusi atau lembaga pemerintahan suatu standar pelayanan publik akan dinilai keefektifannya melalui seberapa terbuka mereka dalam mengemukakan organisasi tersebut kepada khalayak atau dalam hal melayani kebutuhan masyarakatnya. Untuk BPPM DIY sendiri sebagai lembaga pemerintahan yang ada di Yogyakarta telah berusaha untuk memberikan pelayanan publik terbaik secara aktif, berikut penjelasan dari BPPM sendiri:

Strategi komunikasi yang kami lakukan sudah berdasarkan terjun kelapangan juga bukan hanya pasif yang berdasarkan data. Kami dari awal menanggapi laporan yang masuk, mendengarkan permasalahan bahkan kami sampai mengadopsi cara kecamatan lain kan kami udah secara aktif itu. Terus mereka butuh informasi kami juga ada penyuluhan lewat buku, website dan lain-lain. Coba bisa di lihat di website kami itu semua mulai dari profil lembaga, program tahunan, struktur bahkan anggaran itu kami terbuka semua. Pokoknya kebutuhan informasi masyarakat ada semua sampai buku produksi BPPM juga bisa di download diwebsite. (Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB BPPM DIY yaitu drg. Retno Nurmawati, M.Kes pada Jum'at 16 Maret 2018)

Berikut gambar laman website milik BPPM DIY yang sudah memenuhi standar pelayanan terkait informasi publiknya:

**Gambar 3.13**

**Website BPPM DIY**



Sumber: <https://bppm.jogjaprov.go.id>

Selain penjelasan tersebut, karena penelitian ini juga mengambil Kabupaten Kulon Progo secara khusus maka penulis juga bertanya mengenai sifat strategi komunikasi dalam hal standar pelayanan publik yang ada pada pemkab Kulon Progo secara umum dan dinas pemberdayaan KB setempat secara khusus. Berikut hasil wawancara dengan Drs Mardiya mengenai hal tersebut:

Untuk wilayah Kulon Progo kemarin ada beberapa dinas yang dapat penghargaan dari ombudsman terkait pelayanan publiknya. Kalau untuk pemkab Kulon Progo sendiri terkait strategi PUP itu sudah termasuk interaktif sih. Soalnya kami disini memang memposting seluruh informasi dan menjawab pertanyaan yang masuk dari masyarakat. Kami juga memberi ruang untuk masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin menulis opininya untuk diterbitkan. Semuanya sedang kami

perbarui agar seluruh pelayanan publiknya dapat penghargaan semua. Kami juga menggerakkan orang yang datang ke kantor itu kami bilang coba sering mampir ke website aja itu ada semua gitu. Biar yang ngunjungin makin banyak dan kami makin semangat untuk sering nulis di web terkait informasi apapun itu termasuk PUP dan pemahaman mengenai reproduksi tapi kalo pemahaman masalah KB Dalduk ataupun advokasi berbasis reproduksi tetep bisa cek-cek di website dinas PMDPPKB. (Hasil Wawancara dengan Drs Mardiya Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan PMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo pada 20 Maret 2018)

Berikut gambaran website dari dinas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PMDPPKB) Kulon Progo yang mengerjakan program PUP dalam membantu BPPM melaksanakan programnya. Website ini sudah terlihat interaktif karena adanya pojok SMS aduan ataupun keterbukaan publik yang jelas pada laman website pertama (home).

**Gambar 3.14**

**Website Dinas PMDPPKB Kulon Progo**



Sumber : <http://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id>

## **B. PEMBAHASAN**

Menurut Middleton (1980) dalam Cangara (2013:61) strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Tujuan komunikasi yang diinginkan akan dirancang secara mendetail sesuai dengan rencana-rencana teknis dan langkah komunikasi yang biasa organisasi atau lembaga tersebut lakukan baik secara jangka panjang ataupun pendek.

Dalam hal ini BPPM DIY merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta anak-anak secara khusus telah membuat sebuah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan tujuan mengurangi jumlah pernikahan dini di Yogyakarta dan memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Program PUP ini sudah dilaksanakan pada 78 kecamatan yang ada di Yogyakarta sepanjang 2017 lalu. Namun pada penelitian ini penulis hanya memilih kabupaten Kulonpogo sebagai tolak ukur keberhasilan program PUP yang sudah dijalankan. Untuk itu pada poin di bawah penulis akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi yang telah dilakukan BPPM serta upaya dinas PMDPPKB Kulon Progo dalam membantu proses strategi BPPM dalam menginformasikan program tersebut sesuai dengan sajian data yang telah disampaikan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi tahap

perencanaan pelaksanaan dan evaluasi melalui sajian data perencanaan komunikasi dan fungsi manajemen komunikasi yang telah dijabarkan sebelumnya. Lalu selanjutnya seluruh fungsi manajemen tersebut akan diklasifikasikan kembali kedalam strategi yang bersifat pasif, aktif, atau bahkan interaktif. Hal tersebut penulis ambil agar lebih mudah dalam menyampaikan keterkaitan masing-masing komponen dalam suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkomunikasian, pengkontrollan dan pengevaluasian. Berikut penjabaran dari strategi tersebut:

**a. Perencanaan Strategi Komunikasi BPPM DIY**

Suatu lembaga ataupun organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dari setiap program yang akan dilaksanakan. Sepertihalnya penjelasan tersebut BPPM DIY memiliki tujuan strategi komunikasi yang khusus yaitu menyebarluaskan informasi mengenai program PUP kepada sasaran yang telah mereka klasifikasikan. Untuk mencapai tujuan ini, suatu perencanaan strategi komunikasi diperlukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Diketahui perencanaan adalah proses yang menetapkan kemana suatu organisasi akan pergi melalui beberapa syarat yang harus terpenuhi dengan cara yang paling efektif ataupun efisien untuk mencapai ke suatu tujuan. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan mampu meminimalisir hambatan-hambatan ataupun resiko-resiko yang terjadi kedepannya.

Dalam menyusun perencanaan yang baik terdapat beberapa prinsip mendasar yang diperlukan demi keberhasilan tersebut. Berikut prinsip rencana yang dikemukakan oleh Hafied Cangara (2013: 32):

#### 1. Prinsip Partisipatif

Prinsip ini merupakan sebuah rencana untuk mendorong sebuah sikap untuk pengikutsertaan baik dari organisasi yang akan menjalankan ataupun *stakeholder* secara khusus. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Retno Nurmawati bahwa BPPM sendiri memang membuat sebuah program dengan tujuan mengajak dan mempertimbangkan beberapa aspek. Dengan bantuan dukungan sultan dan membuat sebuah program yang dianggap efektif yaitu dengan media *roadshow* (tatap muka) BPPM mengajak seluruh *stakeholder* baik remaja, LSM, dinas lintas SKPD atau dinas yang berkaitan dengan KRR untuk ikut serta berupaya dalam menjalankan program PUP dari awal perencanaan hingga akhir evaluasi.

#### 2. Prinsip Kestinambungan

Prinsip kesinambungan merupakan sebuah prinsip yang dibuat dalam jangka waktu yang lama atau bukan hanya untuk sesaat. Sebuah proses dalam prinsip ini harus dipertimbangkan keberlanjutannya secara berkesinambungan. Perencanaan ini seperti pada tahapan pemberian penanggung jawaban kepada dinas pemberdayaan KB masing-masing kabupaten yang telah dilakukan

oleh BPPM DIY. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Retno bahwa keberlanjutan dari program PUP sendiri memang akan diberikan kepada Dinas pemberdayaan KB dari masing-masing Kabupaten (Dinas PMDPPKB). Sehingga perencanaan yang sudah disusun dapat dikontrol pelaksanaannya agar lebih efektif melalui pihak tersebut.

### 3. Prinsip Holistik

Prinsip holistik adalah prinsip yang disusun secara menyeluruh dan tidak berdasarkan unit-unit. Diketahui dalam sebuah perencanaan beberapa aspek harus dipertimbangkan demi kebutuhan suatu konsep program secara keseluruhan. Senada dengan penjelasan Ibu Retno Nurmawati, sejak awal BPPM DIY mengetahui sudah banyak masalah melalui koordinasi dengan lintas SKPD. Dalam pemilihan konsepnya-pun BPPM DIY mengadopsi cara Saptosari dan berorganisasi dengan Kecamatan tersebut. Mulai dari Rakor awal hingga Rakor evaluasi BPPM mengajak seluruh Kecamatan untuk menerima masukan mengenai program PUP ini.

Perencanaan dari BPPM DIY sendiri merupakan suatu perencanaan strategis yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPPM DIY merupakan perencanaan yang terstruktur dan sudah dianggap matang

karena telah meliputi beberapa komponen penting dalam suatu *planning* dengan jangkauan yang luas seperti berikut:

1. Analisis Situasi

Dalam membuat sebuah program, biasanya lembaga pemerintahan ataupun organisasi yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat akan menganalisis masalah atau situasi melalui beberapa cara dengan melihat realitas sekitar. BPPM DIY sendiri dalam membuat program PUP menganalisis situasi melalui observasi dan diperkuat dengan adanya sumber data dilapangan. Cara yang telah dilakukan oleh BPPM sebenarnya sudah cukup baik terlebih dengan adanya pemilihan metode yang diseleksi atau diadopsi dari kecamatan lainnya. Jika situasi sudah dapat dikenali secara baik seharusnya kemungkinan munculnya sebuah masalah dapat dikenali lebih baik pula. Sehingga dalam menganalisis masalah tersebut BPPM seharusnya menerapkan model analisis masalah yang dianggap efektif seperti model analisis SWOT, terlebih BPPM merupakan suatu lembaga praktisi informasi.

Menurut Cutlip, Scott M, dkk (2006: 331) analisis SWOT merupakan analisis detail terhadap faktor internal dan eksternal dalam situasi problem dapat memberi praktisi informasi yang mereka butuhkan untuk menilai kekuatan (*strength*) organisasi (S), dan kelemahan (*weakness*) organisasi (W), dan mengidentifikasi peluang

(*opportunity* - O) dan ancaman (*threat* - T) dalam lingkungan eksternal. Jika BPPM DIY akan menganalisis situasi menggunakan model analisis SWOT maka BPPM akan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman seperti penjelasan berikut ini:

a. Kekuatan (*Strength*)

Langkah yang pertama yaitu menentukan kekuatan. Dengan mengetahui kekuatan suatu organisasi akan berjalan dengan mudah melaksanakan programnya. Untuk BPPM DIY sendiri sebenarnya sudah mengetahui dan memiliki beberapa kekuatan guna menunjang program PUP pada pelaksanaannya. Contohnya seperti:

1. Adanya dukungan dari Sultan dan para *stakeholder* pembuat kebijakan.
2. Pengambilan analisis masalah dilakukan dengan sumber data yang real dan memang masih menjadi kasus yang belum dapat terselesaikan.
3. Adanya UUD dan hak anak yang harus terpenuhi akan semakin menguatkan program tersebut agar tetap berjalan.
4. Sumber daya, anggaran serta media informasi terpenuhi.

Berdasarkan beberapa kekuatan tersebut BPPM DIY akan terlihat mudah dalam pelaksanaan program terlebih penunjang sarana dan prasarana tersedia dengan baik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Faktor kelemahan merupakan faktor yang harus diminimalisir oleh organisasi karena sumber kelemahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini BPPM DIY harus mempertimbangkan perencanaan strategis yang tepat guna meminimalisir kelemahan tersebut. Penilaian atau hasil dari evaluasi biasanya akan membuat suatu kelemahan organisasi terlihat, contohnya seperti tanggapan mengenai kegiatan deklarasi yang hanya dilakukan sekali oleh BPPM dan penyuluhan juga hanya dilakukan sekali pada saat pra pembukaan deklarasi tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat akan kurang mengerti jika hanya dilakukan sekali tanpa adanya pengulangan mengenai program PUP yang akan dilaksanakan.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang dalam suatu analisis masalah biasanya akan muncul berdasarkan kekuatan organisasi yang mengambil keuntungan dari lingkungan eksternal. Dalam hal ini BPPM DIY akan melihat lebih baik lagi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sebuah peluang yang ada akan dimanfaatkan agar tujuan dapat dicapai dan keberhasilan dapat diraih. Beberapa poin yang telah dijelaskan pada faktor *strength* dapat digambarkan menjadi peluang seperti contoh berikut ini:

- a. Adanya keterlibatan dari media karena Sultan sendiri yang awal mula memberikan dukungan terhadap program tersebut.
- b. Adanya sumber data bahwa kasus pernikahan dini semakin marak dan belum terselesaikan, lalu dengan adanya UUD serta hak anak yang harus diperoleh membuat dukungan dari masing-masing elemen masyarakat menjadi semakin kuat

Sehingga dengan adanya beberapa contoh peluang yang sudah dijelaskan BPPM akan mencapai target dengan melihat peluang serta memanfaatkannya secara efektif.

d. Ancaman (*Threat*)

Strategi yang sudah mengetahui mengenai faktor-faktor eksternal seharusnya sudah mengetahui ancaman apa yang akan hadir pada organisasi tersebut. Bagi suatu organisasi citra merupakan sebuah ancaman yang harus diubah menjadi kekuatan melalui strategi komunikasi yang tepat. Seluruh ancaman atau tantangan yang hadir pada saat strategi dijalankan harus diperkirakan oleh BPPM terlebih BPPM adalah organisasi yang memang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat. Beberapa ancaman dapat diminimalisir melalui model ini seperti misalnya BPPM sudah yakin dengan cara terbaik menurunkan jumlah pernikahan dini melalui deklarasi dan kemudian BPPM sudah tau jika deklarasi tantangan kedepannya akan seperti apa.

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas mengenai bagaimana menganalisis suatu masalah atau situasi, model analisis SWOT dapat dikatakan cara yang tepat bagi BPPM DIY. Terlebih suatu citra bagi organisasi yang bergerak dalam suatu pemerintahan akan dinilai dan ditanggapi secara langsung oleh masyarakat karena kinerja yang dimilikinya.

## 2. Menentukan Tujuan

Dalam sebuah perencanaan suatu tujuan ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sebuah program. BPPM DIY sendiri sudah membuat beberapa tujuan yang spesifik yaitu meningkatkan pemahaman, komitmen dan perubahan perilaku sebagai upaya atau luaran dari program PUP. Diketahui sebuah tujuan yang paling efektif adalah tujuan yang spesifik dan tidak terlalu umum. Selain itu jika tujuan sudah ditetapkan dengan baik maka kinerja suatu organisasi akan mejadi lebih baik pula.

Menurut peneliti jika BPPM sendiri sudah membuat tujuan-tujuan tersebut dengan beberapa pertimbangan yang spesifik serta menghasilkan kinerja yang tinggi. Maka tujuan tersebut dapat tecapai. Tetapi kinerja yang tinggi belum terlalu terlihat jika pada pelaksanaannya BPPM DIY sendiri masih mempertanggungjawabkan secara penuh mengenai program PUP kepada kantor pemberdayaan

KB masing-masing kabupaten yang ada di DIY. Ibu Retno sendiri menyampaikan bahwa untuk PUP dari BPPM hanya memfasilitasi melalui penyuluhan dan deklarasi itupun hanya sekali perkecamatan tetapi di satu sisi pendapat dari Ibu Esti serta Afifah selaku PIK-R merasa bahwa tujuan akan sulit untuk dicapai jika tidak adanya keberlanjutan komunikasi secara spesifik. Padahal menurut Hair, Dan O' dkk (2009:53) tujuan berguna dalam memobilisasi usaha-usaha yang anda butuhkan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Penentuan tujuan membuat anda menyadari kebutuhan energi mental, emosional dan fisik dalam melakukan tugas komunikasi dan mendorong anda untuk menghemat dan menggunakan energi secara cermat. Dari penjelasan tersebut kata anda yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan seperti BPPM DIY. Seharusnya BPPM telah memikirkan kebutuhan mental fisik maupun emosional baik dari komunikator maupun dari komunikan secara penuh. Sehingga jika sudah ada pemikiran yang sama antara BPPM DIY dengan para sasaran seperti remaja ataupun *stakeholder* lainnya maka penilaian ataupun tanggapan mengenai diadakannya program PUP melalui deklarasi tidak terlalu dipermasalahkan.

Terlepas dari hal tersebut untuk menentukan tujuan suatu strategi komunikasi Hair, Dan O' (2009:49) mengemukakan ada enam

langkah dalam hal menentukan tujuan yang efektif. Enam langkah tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi masalah

Dalam pengambilan langkah pertama, BPPM sendiri telah menganalisis dan mengidentifikasi suatu masalah. Masalah yang sudah dianalisis situasinya oleh BPPM seperti poin yang pertama dapat dikatakan sudah sesuai karena berdasarkan data ataupun observasi serta diperkuat dengan adanya beberapa dukungan dari para pihak eksternal terlebih mereka adalah para pembuat kebijakan. Tetapi kelemahan dan ancaman terhadap BPPM sendiri kurang diprediksi kaitannya dalam menginformasikan program PUP tersebut.

2. Memetakan Strategi

Dalam langkah ini strategi akan dibentuk untuk menunjukkan bahwa cara apa yang paling tepat untuk digunakan dalam mencapai sebuah tujuan. Biasanya format sebuah evaluasi sangat dibutuhkan dalam langkah ini. Untuk BPPM sendiri sudah melaksanakan langkah ini dengan mengadopsi cara Saptosari untuk diterapkan pada masing-masing kecamatan yang ada di DIY.

### 3. Menentukan Tujuan Performa

Maksud dari tujuan performa adalah menentukan tujuan yang tinggi tetapi tetap menyadari keterbatasan dari suatu organisasi tersebut. dari beberapa tujuan yang sudah ada pada sajian data dan berdasarkan TOR yang dibuat oleh BPPM DIY sendiri. Tujuan-tujuan seperti untuk memberi pemahaman mengenai kesehatan reproduks dan meningkatkan komitmen setiap elemen masyarakat untuk berupaya dalam mengkampanyekan program PUP merupakan sebuah tujuan yang tinggi karena secara tidak langsung membuat BPPM harus merealisasikan potensi komunikasi mereka secara penuh dan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus direalisasikan dengan matang.

### 4. Mengidentifikasi Sumber Daya yang Diperlukan untuk Mencapai Tujuan

Sebuah prediksi harus dilakukan dalam membangun sebuah tujuan yang efektif. Seperti yang ada pada tahap perencanaan. Segala hal yang berkaitan dengan PUP ini telah dipersiapkan secara matang termasuk dalam hal sumber daya. Sumber daya yang dimaksud oleh BPPM sendiri seperti jadwal dan lokasi yang sudah ditetapkan, anggaran yang sudah dipersiapkan, serta dukungan atau dorongan dari banyak pihak sebagai faktor penguat.

## 5. Kenali Kontingensi yang Mungkin Muncul

Kontingensi adalah sesuatu situasi yang mungkin bisa menghambat organisasi dalam hal mencapai tujuan. Pada langkah ini BPPM belum menjelaskan secara spesifik bagaimana ancaman atau kelemahan dalam cara menginformasikan program PUP tersebut. Tetapi diketahui beberapa tanggapan atau penilaian yang negatif akan membuat kelemahan dan ancaman menjadi perhatian khusus bagi BPPM DIY sendiri. Terlebih tanggapannya bisa dari pengambilan media yang salah, pemasokan anggaran yang belum tersesuaian serta pesan yang belum tersampaikan secara menyeluruh

## 6. Mendapatkan Tanggapan

Diketahui tanggapan berfungsi sebagai acuan dalam mengklarifikasi dan memverifikasi makna. Untuk BPPM sendiri tujuan dibuat dalam bentuk TOR sebelum mengadakan Rakor awal bersama. Tetapi dalam hal mengidentifikasi masalah dan menentukan cara untuk menginformasikan program-nya BPPM DIY telah observasi dan banyak terjun langsung ke lapangan untuk menanyakan tanggapan baik itu lintas SKPD ataupun pada Rakor mengenai tujuan yang telah dibuat mereka, terlebih melihat permasalahan pernikahan dini masih menjadi kasus yang sulit diselesaikan.

Melihat beberapa langkah menurut Hair tersebut, BPPM DIY telah melaksanakan proses pembuatan tujuan yang efektif tetapi ada beberapa langkah yang dalam proses pembuatannya belum terlalu diperhatikan oleh BPPM secara langsung. Terlebih hal-hal tersebut sangat beresiko jika kurang dicermati.

### 3. Mempertimbangkan Sasaran (*Stakeholder*) & Mengorganisasikannya

Sebuah program yang akan dibuat membutuhkan suatu peranan *stakeholder* atau pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan program tersebut. *Stakeholder* yang ada merupakan sebuah aspek eksternal yang sangat penting untuk dijadikan sasaran dalam suatu pelaksanaan strategi organisasi. BPPM DIY menjabarkan sasaran dari program PUP menjadi sasaran primer, sekunder dan tersier secara tepat. Sasaran yang spesifik tersebut dibuat dan diklasifikasikan kembali menjadi lebih khusus oleh BPPM DIY seperti primer yaitu sasaran utama adalah remaja, sekunder sasaran utama adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan KRR dan tersier para pembuat kebijakan ataupun pemerintah. Dengan adanya beberapa sasaran tersebut BPPM akan melayani serta menjembatani pihak-pihak atau yang biasa disebut dengan publik maupun *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Rhenald Kesali (1994) dalam Iriantara, Yosali (2004:8) mengemukakan bahwa salah satu publik organisasi adalah publik primer, sekunder dan marginal. Dalam hal ini BPPM sudah mengkalsifikasikan secara tepat berdasarkan sasaran utama yang paling penting yaitu remaja. Berbeda dengan pendapat Rhenald BPPM sendiri mengesampingkan publik marginal yang mana pengertiannya adalah publik yang diabaikan. BPPM DIY tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan menurut penulis sudah sangat baik dengan adanya pertimbangan publik tersier yaitu seperti Sultan dan para pembuat kebijakan atau peraturan dari masing-masing Kabupaten.

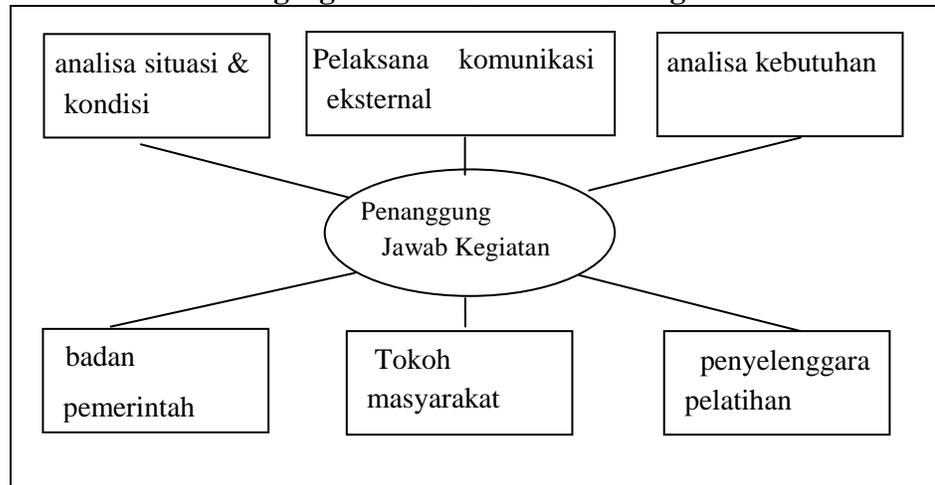
Terlepas dari hubungan BPPM dan para sasaran atau *stakeholder*-nya, sebuah pengorganisasian komunikasi antar pihak perlu dilaksanakan guna keberhasilan suatu program. Pengorganisasian akan menggambarkan pengelompokan yang mana di dalamnya sudah ada pembagian tugas diantara kelompok-kelompok pelaksanaan tugas. Seluruh kelompok yang sudah mendapatkan tugas tersebut akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan tetap berada pada jalur koordinasi yang telah ditetapkan. Menurut data yang diterima oleh penulis. BPPM DIY sudah melaksanakan pengorganisasian dengan cukup baik melalui beberapa bagian. Terlebih pengorganisasian tersebut memang

digunakan karena ruang lingkup atau keadaan masyarakat yang tidak stabil serta arus perubahan yang menuntut mereka untuk memberikan respon secara cepat. Ibu Retno dalam wawancara mengatakan bahwa pengorganisasian yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan evaluasi akan mengarah kepada pemberian kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. Masing-masing bagian inilah yang nantinya akan membuat proses-proses atau upaya kembali terkait program PUP.

Dari penjelasan diatas peran *stakeholder* sangat kuat kaitannya dengan keberhasilan program PUP, sehingga secara tidak langsung BPPM DIY menggunakan proses pengorganisasian pendekatan struktur jaringan. Struktur jaringan pada hakikatnya memang membutuhkan keterlibatan pihak luar organisasi seperti pemerintah dan tokoh masyarakat, terlebih biasanya dinas-dinas yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat akan sangat bergantung .pada struktur jaringan dengan peranan yang saling menguntungkan ini.

Menurut Iriantara (2004:130) pengorganisasian struktur jaringan biasanya digambarkan seperti sebagai berikut:

**Gambar 3.15**  
**Pengorganisasian Struktur Jaringan**



Sumber : Iriantara, Yosol (2004:130)

Dari tabel diatas diketahui BPPM sendiri menggunakan pendekatan struktur jaringan yang memang sangat efektif digunakan organisasi dengan keterlibatan pihak luar organisasi atau BPPM sendiri. Seperti mulai dari mengklasifikasikan situasi dan kondisi komunikasi yaitu remaja usia 10 sampai 24 tahun di ranah sekolah maupun masyarakat, kemudian pelaksana komunikasi secara eksternal diupayakan melalui sasaran sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan KRR, selanjutnya menganalisa kebutuhan seperti faktor-faktor pendukung ditempat contohnya *draft* deklarasi, buku saku dan lain-lain.

Pada pengorganisasian selanjutnya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan, diketahui setelah selesai melaksanakan deklarasi BPPM menyerahkan secara penuh mengenai program PUP

kepada Dinas PMDPPKB masing-masing Kabupaten dan untuk Kulon Progo sendiri Dinas PMDPPKB-nya sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan baik tingkat yang paling umum sampai pada tingkat khusus yaitu sekolah-sekolah. Selain itu peran tokoh masyarakat juga diperlukan BPPM dalam hal menunjang keberhasilan program PUP tersebut, contohnya seperti melibatkan tokoh agama, melibatkan guru dan melibatkan para petugas KUA sebagai penguat. Lalu yang terakhir dengan adanya *stakeholder* dari badan pemerintahan membuat BPPM mendapat kepercayaan yang kuat, terlebih disini Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi orang yang pertama turut mengkampanyekan program PUP.

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas mulai dari pemilihan *stakeholder* dan pengorganisasian kepada masing-masing kelompok sasaran, menurut penulis BPPM DIY sudah mengambil langkah yang tepat dengan memilih pendekatan struktur jaringan terlebih pada kenyataan-nya suatu organisasi yang akan mengadakan suatu kegiatan dengan skala luas akan lebih besar tingkat ketidakpastiannya (ancaman) sehingga BPPM sudah mengemas pengorganisasian bersama *stakeholder* secara tepat.

#### 4. Menentukan Pesan

Dalam suatu proses komunikasi, pesan adalah keseluruhan dari apa yang akan disampaikan oleh komunikator. Biasanya pesan akan

mempunyai sebuah inti atau tema tertentu sebagai pengaruh dalam upaya mencoba mengubah sikap dan tingkah laku dari komunikan. Dalam hal ini pesan yang paling efektif adalah pesan dengan menggunakan bahasa, seperti kita ketahui pesan bisanya bisa berbentuk simbol atau lambang tetapi bahasa-lah yang paling efektif dalam hal persuasif diri.

Menurut S.M Siahaan (1991:73) pesan harus mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pesan harus jelas (*clear*). Dalam hal ini pesan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas.
2. Pesan mencakup keseluruhan (*comprehensif*), ruang lingkup pesan mencakup bagian-bagian yang penting yang patut diketahui oleh komunikan
3. Pesan harus lengkap (*complete*) dan disusun secara sistematis.

Berdasarkan pernyataan di atas, pada dasarnya suatu pesan harus disampaikan sejelas-jelasnya dan mudah dipahami terhadap komunikan. Melihat hal tersebut BPPM sendiri menyimpulkan pesan atau tema “Bolehkah Remaja Kawin”. Tema ini sesuai dengan penjelasan Ibu Retno bahwasannya pemahaman akan dimatangkan dengan tema menarik yang telah disimpulkan. Selain itu untuk

memperkuat pengetahuan sasaran, BPPM DIY sendiri juga mengatakan bahwa pesan akan berbeda pada setiap kabupatennya. Untuk wilayah Kulon Progo secara khusus pesan dibuat menarik dengan tiga struktur pesan yang telah dikemukakan oleh S.M Siahaan. Pertama pesan harus *clear*, hal tersebut terlihat dari singkatan KUHIAS KENANGANKU. Bapak Mardiya mengatakan singkatan KUHIAS KENANGANKU artinya adalah “Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga”. Pesan ini dibuat menarik dengan singkatan yang mudah diingat dan dipahami. Kemudian dalam penyampaianya pesan ini dibuat dalam media kipas yang mana di dalamnya terdapat 10 aspek dalam mengubah perilaku masyarakat yang mengerti masalah kependudukan termasuk PUP. Hal tersebut harus di mengerti oleh seluruh masyarakat sehingga melalui media kipas harapannya masyarakat dapat mudah mengingat dan menyebarkan pesan dan sama-sama mengupayakan program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian Bapak Mardiya juga memperkuat penjelasan pesan tersebut melalui poin-poin penting yang diuraikan kembali jika ingin mengetahui secara lebih mendetail. Sehingga Kuhias Kenanganku tersusun secara sistematis, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Selain penjelasan mengenai aspek-aspek pesan, Widjaja, A.W (1987:61) mengungkapkan bahwa terdapat tiga bentuk pesan yang bersifat efektif. Tiga bentuk pesan tersebut adalah:

1. Informatif

Dari bentuk pesan informatif diketahui bahwa suatu pesan hendaknya berdasarkan data dan fakta yang kemudian akan dicari kesimpulannya sendiri oleh komunikan atau organisasi tersebut. Pesan informatif merupakan pesan yang lebih berhasil dibandingkan pesan persuasif pada saat tertentu, hal ini karena pesan informatif bertujuan untuk sekedar menginformasikan dan memberi tahu secara lebih mendetail. Sehingga organisasi dan sasaran akan saling sepemahaman dan saling mengerti. Untuk BPPM DIY sendiri pesan melalui tema “Bolehkah Remaja Kawin” secara tidak langsung memberikan gambaran sebenarnya ada banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menikah dini pada remaja. Kemudian seluruhnya diinformasikan oleh BPPM diwakili oleh Ibu Retno selaku Kabid KB BPPM agar para remaja, *stakeholder* terkait bidang KRR dan para masyarakat mengerti bahwa apa yang harus dipertimbangkan oleh remaja jika menikah dilaksanakan tanpa adanya kesiapan, sehingga pesan dapat tersampaikan pada saat penyuluhan.

Selain BPPM, dinas PMDPPKB sendiri juga menginformasikan secara lebih mendetail dengan berbagai media baik melalui media kipas yang dibagikan dan dijelaskan pada saat penyuluhan ataupun melalui media youtube. Pesan dibuat secara detail dan diinformasikan, sehingga mereka semua setidaknya sudah berada pada titik faham akan pentingnya Kuhias Kenanganku bagi masyarakat secara umum.

## 2. Persuasif

Bentuk pesan selanjutnya adalah pesan persuasif. Pesan persuasif adalah pesan yang berfungsi untuk merayu, mengajak, membangkitkan pengertian serta menyadarkan masyarakat untuk mengubah tingkah laku diri masing-masing. Perubahan yang terjadi dalam individu masing-masing merupakan perubahan yang memang berdasarkan kemauan individu tersebut tanpa adanya paksaan dari komunikasi secara langsung.

BPPM DIY sendiri bekerja sama dengan Dinas PMDPPKB Kulon Progo membuat sebuah lagu dengan judul “Kuhias Kenanganku’ dan diunggah melalui youtube serta ditonton sebanyak 1,5k. Dengan adanya media kreatif yaitu melalui kipas serta youtube, BPPM DIY dan Dinas PMDPPKB sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah perilaku masyarakat Kulon Progo. Terlebih bahasa digunakan dengan nada dan lirik

yang dapat membantu masyarakat untuk lebih cepat mengingat, mengerti kemudian mengikuti.

### 3. Koersif

Koersif adalah bentuk penyampaian pesan dengan cara memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi bentuk yang terkenal. Pada bentuk ini biasanya akan ada tekanan-tekanan sehingga publik akan merasa tertekan dan ketakutan. BPPM DIY sebagai salah satu lembaga daerah yang bergerak pada bidang pemberdayaan membuat program PUP dengan latar belakang hak anak yang harus terpenuhi dan beberapa undang-undang mengenai pendidikan kesehatan serta keluarga berencana.

Jika adanya pelanggaran dalam hal yang sudah dijelaskan diatas maka pihak tersebut harus menerima resiko dari tindakan mereka sendiri. Kemudian seluruh pasal-pasal dan pengertian bahwa pelanggaran tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dan di jauhi maka masyarakat akan merasa tertekan karena sudah mnegerti bahwa banyaknya peraturan-peraturan penting yang membatasi perilaku pernikahan dini. Tetapi faktanya hingga saat ini walaupun penyampaian pesan sudah melalui tindakan koersif pernikahan dini masih ada saja dan masih menjadi kasus yang sulit dituntaskan.

Jadi dengan adanya dua pesan yang dikemas secara berbeda yaitu jika BPPM hanya menyampaikannya pada saat penyuluhan dan dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri mengambil jalan unik melalui media kipas serta youtube, peneliti merasa hal tersebut merupakan pesan yang efektif walaupun kembali lagi pada pendekatan struktur jaringan yang memang ketidakpastian dalam hal penerimaan masyarakat akan berbeda-beda setiap orang dan perkara pernikahan dini yang masih menjadi pertanggung jawaban seluruh elemen masyarakat.

#### 5. Aktivitas Penganggaran

BPPM DIY menginformasikan program PUP melalui berbagai cara, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan hanya sekali per-kecamatan, maka BPPM DIY menetapkan anggaran dengan cara membuat prediksi biaya yang akan dihabiskan dalam satu kali penyelenggaraan deklarasi. Hal tersebut sesuai dengan perkiran list barang-barang pendukung yang sudah dijelaskan pada TOR BPPM sendiri, seperti spanduk, lembar deklarasi buku saku dan lainnya. Diketahui bahwa aktivitas anggaran sebuah organisasi pemerintahan akan di danai oleh APBD dari masing-masing daerah, sehingga untuk BPPM DIY sendiri maka dana di bebaskan oleh APBD DIY 2017.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa untuk seluruh kegiatan yang menunjang deklarasi dan penyuluhan dari BPPM sudah terpenuhi dari segi anggaran, tetapi BPPM DIY sendiri melupakan fungsi dari dinas PMDPPKB sebagai penanggungjawab dari proses program PUP selanjutnya. Memang, untuk dinas tersebut yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat sudah mempunyai alokasi dana tersendiri untuk menjalankan program PUP dan berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Tetapi alangkah lebih baiknya BPPM DIY sendiri juga menunjang beberapa anggaran dalam terjalannya penyuluhan yang akan dilaksanakan oleh dinas PMDPPKB. Karena Bapak Mardiya sendiri juga mengatakan bahwa anggaran yang ada juga sedikit membatasi mereka untuk terus mengingatkan masyarakat tentang program PUP. Sehingga peneliti menganggap bahwa program PUP yang akan dilaksanakan akan lebih efektif jika keterjalanan anggaran dapat tersusun secara lebih baik lagi dan membantu *stakeholder* yang akan menjadi perpanjangan program PUP untuk selanjutnya.

Dari berbagai macam poin penting yang sudah dijelaskan pada perencanaan yang telah dilakukan oleh BPPM DIY sendiri sebenarnya seluruh aktivitas perencanaan yang dibuat sudah sangat tersusun rapih dan sangat terstruktur. Tetapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan kembali jika akan merancang sebuah program yang akan

melibatkan banyak pihak dan mengantisipasi hambatan maupun ancaman bagi BPPM sendiri. Terlebih BPPM DIY merupakan sebuah organisasi yang memang berada ditengah-tengah masyarakat sebagai badan yang memberdayakan mereka dan *aware* terhadap kebutuhan masyarakat secara khusus ataupun permasalahan sosial seperti pernikahan dini secara umum.

#### **b. Pelaksanaan Strategi Komunikasi BPPM DIY**

Setelah merancang sebuah rencana program, BPPM DIY akan melaksanakan program sesuai dengan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan (*execute*) adalah tindakan yang diambil dalam rangka implementasi perencanaan komunikasi yang telah dibuat (Cangara, 2013: 73). Dalam hal ini BPPM sendiri akan melaksanakan program atau mengkomunikasikannya dengan berbagai saluran dan media komunikasi. Sebuah pesan yang akan dimengerti oleh komunikan harus membutuhkan saluran dan media komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan proses berjalannya sebuah pesan sedangkan untuk media komunikasi sendiri lebih identik dengan alat untuk menyampaikan pesannya. Walaupun pada hakekatnya saluran komunikasi dapat berjalan baik dengan media ataupun tidak. Sesuai dengan sajian data yang sudah dijelaskan, untuk menginformasikan program PUP, BPPM DIY menggunakan saluran informasi dengan cara langsung (tanpa media) dan

secara tidak langsung atau menggunakan media komunikasi. Berikut penjelasan dari saluran komunikasi yang digunakan BPPM tersebut:

a. Secara langsung (*face to face*)

Agar suatu pesan yang disampaikan komunikator sampai pada komunikan dan tergambar jelas, BPPM DIY mengkomunikasikan program PUP melalui penyuluhan dan deklarasi. Komunikasi tatap muka ini dipilih sebagai bentuk pemberian pemahaman yang lebih mendalam mengenai pesan yang ingin disampaikan. Selain BPPM sendiri, dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri juga mengadakan kegiatan penyuluhan kepada warganya. Dalam penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan setidaknya para komunikator atau pengisi materi harus mampu mempersuasif peserta. Senada dengan penjelasan Ibu Retno bahwa materi yang dijelaskan-pun dikemas secara menarik dan mudah dipahami dengan pengisi materi yang dekat dengan mereka sehingga mereka tergerak untuk mengupayakan program PUP.

Selanjutnya digunakan pula deklarasi sebagai penunjang keberhasilan program. Deklarasi yang dilakukan merupakan sebuah sarana atau saluran untuk mempersuasif dan menumbuhkan komitmen peserta agar program PUP dapat dijalankan oleh peserta ataupun pihak yang hadir pada hari tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang persuasif sebenarnya telah dilakukan oleh BPPM

DIY. Terlebih diketahui bahwa dengan adanya pendekatan atau komunikasi persuasif melalui tatap muka ini tanggapan atau efek yang ditimbulkan juga akan dilihat secara langsung. Masyarakat yang mengikuti program sosialisasi maupun deklarasi PUP ini-pun juga masyarakat yang biasanya menjadi *opinion leader* di dalam suatu masyarakat. Sehingga komunikasi tatap muka melalui penyuluhan atau deklarasi ini memang sangat efektif dilakukan.

b. Melalui Media Komunikasi

Komunikasi akan berjalan pula dengan menggunakan sebuah sarana yaitu media komunikasi. Media komunikasi berfungsi sebagai alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk mengantarkan pesannya kepada sasaran atau komunikan. Media komunikasi pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi yang bersifat informatif karena tidak begitu berpengaruh untuk mengubah tingkah laku. Menurut Soyomukti (2010:63-64) media komunikasi dilihat dari jumlah target komunikannya dapat dibedakan atas dua jenis:

1. Media Massa

Media massa merupakan salah satu perantara pesan yang dapat bersifat periodik (elektronik dan cetak) ataupun non periodik (bersifat eventual). BPPM sendiri dalam penyusunan perencanaan juga membuat baliho ataupun iklan di TV. Hal ini senada dengan

penjelasan dari Bapak Heru selaku bagian Advokasi BPPM, beliau menyampaikan bahwasannya sebelum pelaksanaan sosialisasi dan deklarasi sudah ada jauh-jauh hari terpasang spanduk atau baliho mengenai PUP dan iklan di TV tetapi milik BPPM pusat. Sebenarnya melalui penjelasan tersebut BPPM DIY sendiri sudah berusaha sejak awal tetapi cara ini belum terlalu dianggap efektif karena jangkauannya yang terlalu luas dan hanya sekedar pada batasan memberikan informasi.

## 2. Bukan Media Massa

Non-media massa atau bukan media massa merupakan media komunikasi yang diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut yaitu melalui :

### a. Media manusia

Sebagai penghubung keberlanjutan program PUP. BPPM sendiri mengamanahkan kepada masing-masing dinas PMDPPKB untuk melaksanakan program PUP dalam jangka panjangnya. Selain itu pihak-pihak yang berkaitan dengan KRR termasuk kedalam *opinion leader* yang kuat. Sehingga mulai dari pelaksanaan tersebut BPPM mengharapkan komitmen yang dijalankan oleh mereka menjadi suatu keberhasilan serta berpengaruh bagi masyarakat.

Pada umumnya *opinion leader* adalah orang-orang tertentu didalam khalayak yang mempunyai pengaruh besar atas anggota-anggota khalayak yang lain, baik dalam pembentukan opini maupun dalam proses pembuatan keputusan (Wiryanto, 2000:65). Seluruh tamu undangan yang dijadikan sasaran deklarasi atau *stakeholder* pada hari itu sudah sama-sama berkaitan dengan program KRR dan berkomitmen untuk sama-sama mengupayakan program PUP. Sehingga seperti pihak Camat, KUA, Kapolsek, PKB, Komite sekolah, Kepala sekolah, pemuka agama dan lainnya diundang sebagai pemercaya yang dapat menjadi penyalur apa yang telah didapatkan dari pelaksanaan deklarasi dan penyuluhan sewaktu itu. Sebenarnya jika dikatakan pernikahan dini memang terjadi karena kurangnya peran masyarakat untuk membatasi dan mengawasi remaja, hal ini sangat baik dipilih dan efektif untuk diteruskan karena peran dari seluruh elemen masyarakat memang diperlukan untuk mengurangi masalah sosial tersebut.

b. Media benda

Dalam media ini buku digunakan oleh BPPM DIY sebagai media informasi mengenai program PUP. Buku ini dikemas dalam bentuk mini yaitu buku saku dan diselipkan dengan

gambar-gambar yang menarik di dalamnya. Selain menggunakan buku, perkembangan teknologi komunikasi terkini juga melahirkan media yang bersifat multimedia yaitu internet. Dikatakan multimedia karena hampir seluruh bentuk media komunikasi menyatu dalam perangkat elektronik digital yaitu internet (media baru). Dengan banyaknya ruang atau fitur yang ada pada internet membuat BPPM DIY seharusnya memanfaatkan peluang yang besar tersebut tetapi dalam pelaksanaannya hanya Dinas Pemberdayaan KB Kulon Progo sendiri yang bergerak aktif untuk mengikuti perkembangan zaman. Dinas PMDPPKB Kulon Progo menjadikan akun Facebook Dalduk Kulon Progo sebagai media kreatif untuk menyebarkan informasi mengenai masalah kependudukan salah satunya adalah akibat pergaulan bebas yaitu pernikahan dini. Selain itu dalam membagikan pesannya dinas pemberdayaan KB Kulon Progo juga membuat lagu yang diunggah ke youtube dengan judul Kuhias Kenanganku.

Hal ini memperlihatkan bahwa pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dijadikan *pioneer* oleh PMDPPKB sebagai bentuk upaya mereka dalam menginformasikan program PUP dibandingkan kabupaten lain yang belum terlihat upayanya. Menurut peneliti cara ini

termasuk cara yang kreatif sebagai pendekatan personal kepada remaja yang memang terpantau sering membuka jejaring sosial terlebih melalui facebook dan youtube.

Dari seluruh penjelasan di atas, sebenarnya saluran komunikasi dengan mempertimbangkan pesan nya seperti apa, komunikatornya bertindak bagaimana serta media yang dipilih seperti apa itu sudah sangat terlihat efektif. Terlebih dalam hal pelaksanaan yang sudah diperkirakan, media dan saluran yang dipilih BPPM memiliki fungsi mempermudah (efektif), mempercepat (efisien) dan membantu menyalurkan isi pesan yang bersifat abstrak (konkrit).

Selain faktor pendukung pelaksanaan seperti saluran dan media komunikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita mengetahui bahwa sebuah program pasti memiliki faktor penghambat dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Dalam hal ini BPPM DIY yang diwakili oleh Ibu Retno mengatakan bahwa kegagalan selama proses *roadshow* (penyuluhan maupun deklarasi) tidak ada, sehingga pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dan merata pada seluruh kecamatan full selama satu tahun.

Berlainan dengan Ibu Retno, Bapak Mardiya sendiri selaku Kasubbid Advokasi Dinas PMDPPKB Kulon Progo mengatakan salah satu faktor penghambat mereka dalam melakukan proses program PUP

adalah anggaran yang terbatas, sehingga penyuluhan tidak sering dilakukan dan komunikasi berjalan sedikit tidak efektif. Jadi BPPM DIY menurut peneliti kurang mengorganisir anggaran guna penunjang pelaksanaan dalam keberlangsungan tindak lanjut program PUP.

Selanjutnya faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan program-pun sangat banyak didapatkan oleh BPPM DIY terlebih adanya UUD yang memperkuat, *stakeholder* yang sama-sama berupaya, saluran komunikasi yang kompeten serta pemanfaatan media komunikasi yang saat ini sangat disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Beberapa faktor tersebut seharusnya menjadi suatu keberhasilan program PUP terlebih pada BPPM DIY.

Kemudian dalam pelaksanaan sebuah program untuk dapat melihat langkah-langkah yang dijalankan sudah mulai menyimpang dari tujuan program atau ekspektasi yang mulai berbalik dengan keadaan dibutuhkan sebuah proses pengawasan agar strategi dapat bernilai efektif kembali. Dalam sebuah kegiatan komunikasi Manullang (1982) dalam Iriantara, Yosol (2004: 138) mengatakan pengawasan merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilai pekerjaan tersebut dan mengoreksinya bila diperlukan dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Biasanya pengawasan akan dijalankan dengan dua prinsip pokok yaitu :

- a. Rencana merupakan standar pelaksanaan
- b. Pemberian wewenang dan instruksi

Menurut dua prinsip tersebut BPPM memang sudah merencanakan bahwa pengawasan tidak dilaksanakan secara langsung tetapi hanya melalui kantor dinas PMDPPKB dari masing-masing Kabupaten saja. Hal ini berkaitan dengan poin selanjutnya yaitu pemberian wewenang dan instruksi. Karena pada hakikatnya program PUP merupakan program yang harus diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat, maka untuk pengawasannya sendiri ada berbagai macam cara yang telah dikembangkan oleh Dinas PMDPPKB. Contohnya seperti penjelasan pak Mardiya misalnya untuk polisi Kulon Progo sering dilaksanakan patroli di alun-alun jika sudah tengah malam, lalu sering berkunjung ke tempat-tempat yang sering didatangi remaja bahkan diperkuat dengan argumen dari ibu Endah untuk daerah Gunung Kidul sudah diadakan satgas, sehingga mulai terlihat sistem *controlling* yang baik dari beberapa elemen masyarakat. Terlebih untuk PIK R dan beberapa sekolah juga mulai menginisiasi kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan program PUP dan peningkatan pemahaman mengenai kespro.

Selain itu, instruksi pemerintah daerah yang menjadi penunjang dalam pengawasan ini juga terlihat dari semakin rumitnya pasangan yang ingin menikah dini karena suatu hal. Pada peraturan bupati Kulon

Progo sendiri contohnya, peraturan yang harus dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah dibawah umur 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki harus mendapat rekomendasi dari P2TP2A di Dinsos P3A Kulon Progo. Hal ini sesuai dengan instruksi bupati Kulon Progo untuk mengawasi perkembangan kasus pernikahan dini.

Manullang (1982) dalam Iriantara, Yosali (2004:139) juga mengatakan bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan langkah untuk mengumpulkan fakta. Pengumpulan fakta itu dapat dilakukan melalui :

a. Peninjauan

Pada proses pengawasan melalui peninjauan BPPM DIY sendiri mengatakan bahwa tidak ada peninjauan secara tindak lanjut ke masing-masing kecamatan kembali karena BPPM DIY akan menerima laporan dari masing-masing dinas pemberdayaan KB yang ada di masing-masing Kabupaten. Sedangkan untuk dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri peninjauan dilaksanakan dengan sering bertanya langsung dengan KUA dari masing-masing kecamatan lalu bertanya langsung dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat juga pernah dilakukan oleh Dinas pemberdayaan KB tersebut.

b. Laporan Lisan

Untuk laporan lisan sendiri BPPM DIY memang akan melihat sudah sejauh mana program PUP masih diupayakan oleh masyarakatnya. Sehingga laporan lisan akan diterima BPPM tetap melalui dinas PMDPPKB setempat.

c. Laporan Tertulis

Laporan tertulis yang dimaksud disini adalah data dan fakta. Biasanya dari hasil laporan seperti berita di koran atau jumlah pernikahan dini yang tercatat pada Pengadilan Agama akan dilaporkan kepada BPPM DIY sebagai tolak ukur keberhasilan program. Maka BPPM DIY seharusnya melakukan pantauan secara terus menerus mengenai jumlah pernikahan dini yang disetujui sebabnya bagaimana, berapa jumlah dispensasi kawin pada beberapa bulan belakangan ini. Seharusnya BPPM DIY melihat dan meninjau kembali data tersebut.

d. Laporan dan Pengawasan pada Hal-hal yang dianggap Istimewa

Laporan dan Pengawasan pada hal-hal yang tidak biasanya juga dapat dikatakan pada aspek yang paling berpengaruh untuk BPPM DIY sendiri. Seharusnya BPPM DIY melakukan pengawasan yang lebih khusus terhadap data yang kasus pernikahan dininya paling tinggi tahun lalu. Atau bisa saja semisal karena kondisi geografis dan aspek-aspek tertentu yang

mendukung adanya pernikahan dini berlangsung secara terus menerus. Hal ini dapat mengantisipasi kegagalan strategi komunikasi yang sudah dijalankan BPPM sendiri.

Berbagai pengawasan yang sudah dijelaskan belum memperlihatkan pengawasan yang ketat dari BPPM sendiri, padahal jika pengawasan secara langsung dan bersifat terus menerus dilaksanakan oleh BPPM program akan lebih efektif kembali dan segala kegagalan dapat di minimalisir sebelum melebar. Selain itu pengawasan yang hanya dilakukan berdasarkan suatu tanggapan tanpa adanya tindak lanjut dalam menanggapi tanggapan tersebut juga dapat membuat strategi dinyatakan gagal.

### **c. Evaluasi Strategi Komunikasi**

Komponen pengolahan proses strategi komunikasi yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan metode pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya (Cangara, 2013: 148). Biasanya kegiatan evaluasi akan bertitik tolak dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam aktivitasnya, evaluasi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Evaluasi Program (*summative evaluation*)

Evaluasi program merupakan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa fokus yang berkaitan dengan tujuan. Dengan kata lain evaluasi ini akan melihat sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal*) dari suatu kegiatan. Dalam hal ini BPPM DIY sendiri mengadakan evaluasi dengan cara mengumpulkan perwakilan masing-masing kecamatan kembali seperti halnya rapat koordinasi. Sehingga untuk evaluasi program sendiri BPPM dianggap kurang aktif terlebih program dalam tindak lanjut diserahkan secara penuh kepada Dinas PMDPPKB masing-masing Kabupaten. Jika dilihat dari tujuan utama BPPM DIY mengadakan program PUP yaitu:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman, hal ini sudah dilaksanakan oleh BPPM dan dibantu oleh Dinas PMDPPKB Kulon Progo serta elemen masyarakat lainnya seperti PIK-R, Guru ataupun KUA tetapi tetap saja pemahaman harus tetap dibangun supaya melekat dalam diri individu masing-masing.
- b. Untuk meningkatkan komitmen remaja, dengan cara deklarasi penguatan sikap atau komitmen dianggap sangat efektif untuk dilakukan. Tetapi sama seperti yang dikatakan oleh Hafifah, jika deklarasi tanpa adanya tindak lanjut yang berarti juga dapat menyebabkan kegagalan, karena banyak dari remaja sendiri lupa

jika mereka mempunyai komitmen tetapi lebih kepada hanya mengucapkan dan menghadiri undangan saja.

- c. Untuk meningkatkan dukungan dan komitmen *stakeholder*, sebagai upaya meningkatkan program PUP dukungan dan komitmen para *stakeholder* memang sudah mulai terjalin. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Retno bahwa bahkan ada beberapa desa yang mengadakan deklarasi kembali sebagai penguatan yang lebih mendasar lagi, kemudian ditandai dengan adanya rekomendasi yang sudah mulai berjalan seperti di Kulon Progo ada rekomendasi dari P2TP2A yang harus dipenuhi terdahulu jika masih dalam tahap pernikahan dini.
- d. Mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan termasuk ke dalam media sosial, untuk BPPM DIY sendiri sebelum diadakannya *roadshow* ke seluruh Kecamatan yang ada di DIY, program PUP awalnya ditandai dengan adanya kegiatan Kampanye bersama di GOR Amongrogo dan dihadiri oleh Sultan. Mulanya setiap anak wajib memposting dengan #kampanyepup2016 tetapi pada kenyataannya setelah acara tersebut selesai sudah tidak ada lagi kampanye program secara tindak lanjut. Tetapi di sisi lain dinas PMDPPKB masih tetap aktif menjalankan kampanye PUP melalui media sosial seperti facebook. Hal ini agar masyarakat

Kulon Progo juga tetap aktif mengikuti perkembangan mengenai program PUP.

Melalui berbagai macam penjelasan terlihat bahwa ada beberapa tujuan yang berhasil sesuai dengan rencana dan ada hambatan atau tujuan yang kurang tercapai. Sehingga seharusnya evaluasi yang secara tepat harus dilakukan BPPM untuk mencapai tujuan secara maksimal.

## 2. Evaluasi Manajemen (*formative evaluation*)

Evaluasi manajemen merupakan evaluasi yang didasari pada fokus pencapaian operasional kegiatan. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah selama proses pelaksanaan berlangsung. Untuk BPPM sendiri selama *roadshow* ke berbagai kecamatan tidak ada hambatan berlebih dan berjalan sesuai rencana. Tetapi untuk penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri terhalang dana dalam pelaksanaannya. Kemudian dinas PMDPPKB juga membuat cara yang unik untuk melihat perkembangan program PUP pada masyarakatnya, dengan bertanya dan memvideokan masyarakat secara random untuk melihat sudah sejauh mana pemahaman masyarakat mengerti mengenai program tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan program pula. Selanjutnya data yang disajikan oleh salah satu

perwakilan KUA dengan batas wilayah kecamatannya paling luas juga menunjukkan hasil bahwa program PUP dalam hal pemahaman kepada anak remaja dapat dikatakan baik karena jika dibandingkan pada tiga bulan pertama di tahun lalu dan tahun ini data yang disajikan menurun. Walaupun tidak signifikan menurunnya dan termasuk ke dalam kategori penting diperhatikan karena sudah mulai diberitakan di media massa pada bulan lalu.

Dari seluruh penjelasan mengenai evaluasi di atas, sebenarnya peneliti menilai evaluasi yang dilakukan oleh BPPM sendiri baik program maupun manajemen kurang terlihat maksimal padahal evaluasi juga akan menentukan citra suatu perusahaan atau organisasi yang mereka bangun sendiri. Jadi alangkah lebih baik lagi jika BPPM DIY mengadakan tindak lanjut langsung ke lapangan dan tidak hanya menerima laporan-laporan yang masuk saja tanpa melihat realitas yang terjadi.

#### **d. Strategi Komunikasi Pasif, Aktif dan Interaktif**

Dari seluruh aktivitas komunikasi yang sudah dijelaskan diatas, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPPM DIY sendiri tergolong kedalam strategi komunikasi yang bersifat interaktif. Karena diketahui bahwa strategi yang dilaksanakan mulai dari tahapan menganalisis masalah BPPM sendiri sudah pada tahapan aktif, yang mana diketahui dikatakan

strategi pasif jika hanya melakukan berdasarkan data observasional saja kemudian aktif sudah mulai memasuki tahapan turun kelapangan dan mencari data ataupun laporan dengan berbagai sumber yang sudah dipertimbangkan. Tetapi untuk menuju strategi komunikasi yang bersifat interaktif dengan standar *e-government*, BPPM sendiri belum terlalu faham bagaimana standar yang pas untuk sebuah lembaga pemerintahan. Strategi komunikasi interaktif dengan standar *e-government* diartikan sebagai strategi yang memanfaatkan website sebagai media perantara dalam hal memenuhi kebutuhan khalayak mengenai program atau kegiatan lembaga pemerintahan secara lebih mudah dan efisien. Menurut Melkior N.N Sitokdana (2015: 290 dalam Jurnal Buana Informatika Volume 06 Nomor 04 tahun 2015) mengatakan adapun ciri-ciri situs web lembaga pemerintahan yang sudah menggunakan *e-government* dapat dilihat melalui kelengkapan:

a. Sisi Transparasi

Untuk website dan strategi yang dilakukan oleh BPPM sendiri pada sisi transparasi sudah diterapkan dengan baik. Adanya laporan pengelolaan anggaran, rencana program dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta evaluasi kinerja dapat dilihat pada website resmi BPPM. Selain itu untuk Dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri untuk rencana program dan penjabaran tugas pokok sudah terdapat pada

website mereka. Sehingga dalam hal transparansi BPPM sendiri sudah melakukan dengan baik.

b. Sisi Layanan

Pada sisi layanan sendiri BPPM DIY mengembangkan informasinya dengan mencantumkan *link* SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak), TESA (Telepon Sahabat Anak), dan P2TPAKK (Rekso Dyah Utami). *Link –link* tersebut berkaitan dengan program PUP yang memang jika terjadi pernikahan dini masalah sosial yang timbul juga akan sangat mempengaruhi anak. Selain itu untuk Dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri memasukkan portal Kulon Progo menuju smart city, serta link-link yang membantu proses pelayanan dinas tersebut. Seperti Link SIDUGA (BKKBN), BPPM DIY, LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), serta SABERPUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar)

c. Sisi Efisiensi

Dari segi efisiensi, adanya situs web yang mulai berkembang yang dimiliki oleh BPPM DIY dan Dinas PMDPPKB sendiri seharusnya meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan ketepatan informasi. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut sebagai program yang baru pertama kali dilakukan oleh BPPM fungsi efisiensi ini kurang memadai. Karena BPPM masih sedikit menerima tanggapan mengenai PUP. Sehingga pada tahapan pelaksanaan serta

pemanfaatan website tidak terlalu nampak dan hanya sekedar berita mengenai pelaksanaan *roadshow* saja.

d. Sisi Aspirasi

Aspirasi yang datang dari masyarakat akan ditampung melalui media *center*, hal inilah yang dikatakan strategi komunikasi yang berstandar *e-government*. Untuk BPPM dan Dinas PMDPPKB Kulon Progo sendiri, media *center* yang dimiliki sudah memanfaatkan sejumlah fasilitas informasi seperti *email*, *telephone*, alamat website, portal aspirasi dan buku tamu. Sehingga jika masyarakat ingin beraspirasi terhadap program PUP sangat terbuka lebar dan fasilitas memadai.

e. Sisi Tampilan

Dalam segi tampilan navigasi yang ada pada dua website tersebut sangat mudah untuk diakses dan dimengerti, warna yang dominan pada website tersebut-pun mampu menunjukkan identitas. Selain itu informasi yang diberikan juga cukup segar walaupun mungkin akan lebih baik lagi jika kelengkapan konten diperbaharui.

f. Sisi Update

Untuk melihat perkembangan jumlah masyarakat yang mengakses website tersebut BPPM DIY dan Dinas PMDPPKB membuat pojok statistik pengunjung. Sehingga mereka dapat memantau secara aktif sudah berapa banyak pengunjung pada hari

tersebut. Selain itu berita-berita, aktivitas dinas dan lainnya selalu dimunculkan up to date.

Dari berbagai macam penjelasan diatas strategi komunikasi yang dikemas oleh BPPM DIY sudah tergolong strategi komunikasi interaktif. Tetapi untuk dikatakan strategi komunikasi yang interaktif dengan berbasis *e-government* itu belum cukup untuk didapat oleh BPPM maupun Dinas PMDPPKB karena masih banyak hal-hal yang dipenuhi baik itu dari segi efisiensi, layanan ataupun update. Memang diketahui bahwa standar *e-government* lebih tepat digunakan untuk situs website milik pemerintahan. Tetapi dinas-dinas ataupun lembaga pemerintahan alangkah lebih baik jika dapat mempertimbangkan strategi berbasis *e-government* mengikuti perkembangan zaman dan era globalisasi yang semakin canggih, terlebih mewujudkan kota Yogyakarta menjadi kota *smart city*.